

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OLEH
SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG
(STUDI KENDARAAN MOBIL BARANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

OLEH:

JULIANDA

NPM : 177110357

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : JULIANDA
NPM : 177110357
Pogram Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konfrehensif.

Pekanbaru, 10 Februari 2022

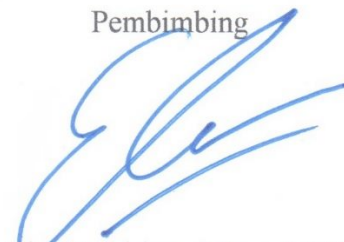
Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik

Ketua



Lilis Suriani S.Sos., M.Si

Pembimbing



Eko Handrian, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : JULIANDA
NPM : 177110357
Pogram Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memnuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 10 Februari 2022
Sekretaris,

Ketua

Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Kartius, S.Sos., M.AP

Anggota

Herman, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 036/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 29 Januari 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Senin tanggal, 31 Januari jam 13.30 – 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Julianda
NPM : 177110357
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (Pkb) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang)

Nilai Ujian : Angka : "82,33" ; Huruf : "A-"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Kartius, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Herman, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd	Notulen	4. 

Pekanbaru, 31 Januari 2022

An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 036/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Julianda
N P M : 177110357
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (Pkb) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang)

Struktur Tim :

1. Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Kartius, S.Sos., M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Herman, S.Sos., M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Januari 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : JULIANDA
NPM : 177110357
Pogram Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan maskan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 10 Februari 2022

Ketua

Sekretaris,

Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Kartius, S.Sos., M.AP

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Program Studi Administrasi Publik

Ketua

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Lilis Surtani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : **“Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang)”**. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Penulisan Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis selesaikan dalam meraih gelar sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi program studi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini bukan hanya karena usaha keras dari penulis sendiri, akan tetapi karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses menyelesaikan studi dan skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivator dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr. Syarul Akmal Latief. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suryani S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Eko Handrian S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sekaligus sebagai Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu dalam membimbing dan memberikan semangat kepada penulis serta mengarahkan penulis melalui saran yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen beserta Staf Pegawai khususnya pada Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Teguh Amanto SE., MM selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan yang telah memberikan izin penelitian dalam membantu kelancaran penelitian ini dan Bapak Alfizar S.Sos selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor beserta Bapak/Ibu pegawai pada Kantor Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang yang telah memberikan saya data serta sedikit banyaknya ilmu sehingga saya mampu menyelesaikan penelitian ini.
7. Terkhususnya kupersembahkan untuk kedua orang tuaku yaitu untuk ayahanda Nasrun dan Ibunda Raasnawati beserta Abangku Safarunsyah Yudi Utama dan Adikku Tri Kurnia Putra, serta kepada seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya selalu memberikan dukungan kepada penulis dan membantu dalam segi materi maupun doa'anya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi.

8. Kepada teman seperjuangan angkatan 2017 jurusan Administrasi Publik dan kepada seluruh rekan yang terlibat dalam memberikan dukungan maupun sarannya kepada saya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis harapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.



Pekanbaru, 10 Februari 2022

Penulis

Ttd

JULIANDA

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	19
A. Studi Kepustakaan.....	19
1. Konsep Administrasi	19
2. Konsep organisasi	22
3. Konsep Manajemen	24
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	26
5. Konsep Pelaksanaan	30
6. Konsep Kebijakan	34
7. Konsep Pengujian Kendaraan Bermotor.....	35
B. Kerangka Pikir	37

C. Hipotesis.....	38
D. Konsep Operasional	38
E. Operasional Variabel.....	42
F. Teknik Pengukuran	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Populasi dan Sampel	49
D. Teknik Penarikan Sampel	50
E. Jenis dan Sumber Data.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	53
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	53
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	55
A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Tanjungpinang.....	55
B. Kondisi Transportasi Kota Tanjungpinang	56
C. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	58
D. Struktur Keorganisasian Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang ..	58
E. Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang	64
F. Bagan Alur Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpijngang.....	65
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Identitas Responden	68
B. Hasil dan Pembahasan	73
C. Rekapitulasi Jawaban Respoonden Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang).....	104

D. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (studi Kendaraan Mobil Barang).....	109
--	-----

BAB VI PENUTUP	110
-----------------------------	------------

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA	114
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	117
-----------------------	------------



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Jumlah Kendaraan Yang Melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kendaraan Mobil Barang di Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang.....	10
Tabel I.2 : Jumlah Emisi Gas Buang Pada Kendaraan Mobil Barang di Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.....	11
Tabel I.3 : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	12
Tabel I.4 : Tahapan dan Waktu Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Oleh Seksi Pengujian kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	13
Tabel I.5 : Struktur dan Besarnya Tarif Rertibusi Pengujian Kendaraan Bermotor Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	15
Tabel I.6 : Jumlah Pegawai Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.....	16
Tabel II.1 : Operasional Variabel penelitian pelaksanaan Pengujian kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang (Studi Kendaraan Mobil Barang).....	42
Tabel III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian pada Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	50
Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang 2021	54
Tabel IV.1 : Sarana dan Prasarana Pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Tanjungpinang.....	64
Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Responden Pegawai Menurut Jenis Kelamin Pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.....	68
Tabel V.2 : Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Pada Supir atau Pemilik Kendaraan Bermotor Di Kota Tanjungpinang.....	69
Tabel V.3 : Distribusi Jumlah Responden Pegawai Menurut Umur (Usia) Pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang.....	70

Tabel V.4	: Distribusi Jumlah Responden Supir atau Pemilik Kendaraan Menurut Umur Pada Mobil Barang Kota Tanjungpinang.....	71
Tabel V.5	: Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Pegawai Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kota Tanjungpinang.....	72
Tabel V.6	: Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Supir atau Pemilik Kendaraan Mobil Barang Kota Tanjungpinang.....	73
Tabel V.7	: Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Standar dan Sasaran Kebijakan Untuk Pegawai.....	74
Tabel V.8	: Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Standar dan Sasaran Kebijakan Untuk Supir atau Pemilik Kendaraan.....	76
Tabel V.9	: Dsistribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Sumber Daya Untuk Pegawai Seksi PKB Kota Tanjungpinang.....	80
Tabel V.10	: Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Sumber Daya Untuk Supir atau Pemilik Kendaraan.....	83
Tabel V.11	: Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Komunikasi Antar Organisasi Untuk Pegawai Seksi PKB Kota Tanjungpinang.....	86
Tabel V.12	: Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Komunikasi Antar Organisasi Untuk Supir atau Pemilik Kendaraan.....	88
Tabel V.13	: Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Karekteristik Agen Pelaksana Untuk Pegawai Seksi PKB Kota Tanjungpinang.....	91
Tabel V.14	: Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Karakteristik Agen Pelaksana Untuk Supir atau Pemilik Kendaraan.....	93
Tabel V.15	: Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonom, dan Politik Untuk Pegawai Seksi PKB Kota Tanjungpinang.....	96
Tabel V.16	: Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik Untuk Supir atau Pemilik Kendaraan.....	98
Tabel V.17	: Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Disposisi Impelementor Untuk Pegawai Seksi PKB Kota Tanjungpinang..	100
Tabel V.18	: Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Disposisi Implementor Untuk Supir atau Pemilik Kendaraan.....	102
Tabel V.19	: Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) Untuk Pegawai.....	105

Tabel V.20 : Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) Untuk Supir atau Pemilik Kendaraan..... 107



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil barang)	37
Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dishub Kota Tanjungpinang.....	60
Gambar IV.2 : Struktur Organisasi Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang.....	62
Gambar IV.3 : Bagan Alur Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang.....	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Kuisisioner (Untuk Masyarakat Sebagai Pemilik Kendaraan) Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang).....	118
2 : Daftar Kuisisioner (Untuk Pegawai) Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang).....	124
3 : Daftar Wawancara (Untuk Kepala Seksi PKB Dishub Kota Tanjungpinang) Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang).....	130
4 : Data Telly (Untuk Pegawai) Tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang).....	133
5 : Data Telly (Untuk Masyarakat Sebagai Pemilik Kendaraan) Tentang Penelitian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang)	134
6 : Hasil Dokumentasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang).....	137
7 : SK Dekan Fisipol UIR No.1683/UIR-Fs/Kpts/2021 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Dekan Fisipol Universitas Islam Riau.....	146
8 : Surat Rekomendasi Riset No:3345/E-UIR/27-Fs/2021 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau	147
9 : Surat Keterangan Penelitian No: 2847/2n.1/DPMPTSP/2021 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.....	148
10 : Surat Rekomendasi Penelitian No: 071/263/4.5.01/2021 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang	149
11 : Surat Keterangan No: 421/410/5.5.01/2021 dari Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.....	150

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JULIANDA
NPM : 177110357
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, Naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan pernyataan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Februari 2022

Penulis,



JULIANDA

**PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OLEH
SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG
(STUDI KENDARAAN MOBIL BARANG)**

ABSTRAK

Oleh

**JULIANDA
NPM : 177110357**

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Seksi PKB

Pengujian kendaraan bermotor adalah proses kegiatan menguji atau pemeriksaan yang dilakukan terhadap kondisi kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan yang dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kewenangan yang disebut sebagai penguji dalam rangka memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan layak jalan. Tipe penelitian yang digunakan ialah Survey Deskriptif dengan menggunakan Pendekatan Kuantitatif yaitu dengan teknik pengumpulan data melalui kuisioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terdapat dua kelompok populasi yaitu Pegawai Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang berjumlah 10 orang dan masyarakat berjumlah 60 orang. Dua teknik sampling yang dipergunakan dalam menetapkan individu sampel adalah teknik sensus untuk populasi pegawai dinas perhubungan kota Tanjungpinang dan teknik incidental sampling untuk kelompok masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, kuisioner, dan observasi. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik, dan Disposisi Implementor. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Kendaraan Mobil Barang di Kota Tanjungpinang berjalan dengan “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya sasaran pada pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sehingga masih banyak ditemukan kendaraan mobil barang yang tidak layak jalan dan tidak melaksanakan wajib uji pada kendaraannya, dan belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan mobil barang dalam memberikan pemahaman secara baik dan jelas serta mudah dimengerti.

IMPLEMENTATION OF MOTOR VEHICLE TESTING (PKB) BY THE MOTOR VEHICLE TESTING SECTION AT THE TANJUNGPINANG CITY TRANSPORTATION OFFICE (STUDY OF GOODS CAR VEHICLES)

ABSTRACT

By

JULIANDA
NPM : 177110357

Keywords: Implementation, Motor Vehicle Testing, Section PKB

Motor vehicle testing is the process of testing or checking the condition of motor vehicles, train and outboard trains carried out by officers who have the authority referred to as testers in order to meet the provisions of technical requirements and roadworthy. The type of research used is Descriptive Survey by using Quantitative Approach, namely by data collection techniques through questionnaires, interviews, observations, and documentation. There are two population groups, namely employees of the Tanjungpinang City Transportation Office which amounts to 10 people and the community amounts to 60 people. The two sampling techniques used in determining individual samples are census techniques for the population of Tanjungpinang city transportation officials and incidental sampling techniques for community groups. The data collection technique used consists of primary data collected using interviewing, questionnaire, and observation techniques. Assessment indicators used include Policy Standards and Objectives, Resources, Inter-Organizational Communication, Characteristics of Implementing Agents, Socio-Economic and Political Environmental Conditions, and Implementor Disposition. From the results of this study shows that the Implementation of Motor Vehicle Testing on Freight Car Vehicles in Tanjungpinang City runs with "Quite Implemented". This is because there are not the maximum targets in motor vehicle testing conducted by the Tanjungpinang City Transportation Office so that there are still many found goods car vehicles that do not carry out mandatory tests on their vehicles, and not the maximum socialization given to the public as drivers or owners of freight car vehicles in providing a good understanding and clear and easy to understand.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan sebuah kota tidak dapat dipisahkan oleh kebutuhan akan berbagai sarana dan prasarana layanan publik untuk membantu kebutuhan pada suatu daerah.. Perkembangan penduduk yang cepat pada sebuah kota sangat mempengaruhi kebutuhan akan sarana dan prasarana. Salah satu sarana dan prasarana layanan publik yang perlu diperhatikan adalah lalu lintas, yang merupakan metode yang memiliki peran penting dalam memperlancar akan kemajuan pada pembangunan. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi suatu daerah untuk melakukan berbagai pendekatan dalam memenuhi serta meningkatkan perekonomian.

Salah satu unsur komponen penting yang terjadi pada lalu lintas ialah transportasi, dimana transportasi ini benar-benar sangat menjunjung tinggi aktivitas kegiatan dan pergantian roda kehidupan masyarakat terutama dibidang perekonomian seperti perdagangan dan industri. Dalam kegiatan ini sarana dan prasarana sangat dibutuhkan agar mampu mendukung kegiatan di wilayah kota. Wilayah kota merupakan suatu tempat kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi setiap aktivitasnya. Oleh karena itu, banyak setiap individu yang membutuhkan akomodasi dalam transportasi, sehingga terciptanya kemajuan teknologi yang mampu menjadi sebuah kemajuan. Dengan kemajuan inovasi teknologi dibidang transportasi, peningkatan lalu lintas dan angkutan jalan akan menjadi lebih berkembang dari sebelumnya.

Kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari sarana transportasi yang sangat penting peningkatan kegiatan ekonomi, sosial dan kebudayaan suatu negara

mengingat kendaraan bermotor ini memiliki peran sebagai alat transportasi orang dan juga barang dari satu wilayah ke wilayah lain dalam waktu yang cukup singkat, efisien, dan efektif. Namun masih banyak masalah yang ditemukan pada kendaraan bermotor yang seperti tidak ada penyelesaiannya. Mulai dari kurangnya perhatian maupun kesadaran pengemudi atau pemilik kendaraan terhadap aturan lalu lintas hingga pelanggaran-pelanggaran nyata yang sering terjadi dilapangan, sehingga keamanan seringkali menjadi hal yang tidak diperhatikan. Kemudian masalah dibidang transportasi adalah masalah mengenai jumlah kecelakaan yang sering terjadi dan permasalahan pada lingkungan, salah satu penyebab timbulnya kecelakaan lalu lintas itu adalah kondisi kendaraan yang digunakan.

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila di setiap daerah terutama pada perkotaan telah ditetapkan ketentuan maupun peraturan lalu lintas di jalan raya dengan maksud dan tujuan untuk memberikan keselamatan saat berkendara, kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang menggunakan kendaraan bermotor harus mampu menjamin daya jangkau dan memperhatikan keselamatan bersama, kelestarian lingkungan dalam tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan. Pasal 5 ayat (1) dan (2), menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas lalu lintas jalan dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah yang berperan dan bertanggung jawab dalam

pembinaan disini adalah kementerian perhubungan dan atau kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang jalan di daerah pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan itu meliputi 4 hal yaitu perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Dan dalam melaksanakan pembinaan pemerintah dapat menyerahkan sebagian dari urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Menurut pasal 6 ayat (4), urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

- a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada diwilayah kabupaten/kota.
- b. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.

Pelaksanaan serta layanan yang dinilai mampu memberikan jaminan keselamatan masyarakat pada lalu lintas dan angkutan jalan yaitu pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor (PKB) atau yang dikenal dengan Uji Kir. Pengujian kendaraan bermotor adalah proses kegiatan menguji atau pemeriksaan yang dilakukan terhadap kondisi pada kendaraan bermotor, kereta Gandeng, dan kereta tempelan yang dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kewenangan yang disebut sebagai penguji dalam rangka memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan layak jalan. Jika suatu kendaraan dikatakan laik jalan maka akan mendapatkan izin kelayakan kendaraan yang dikeluarkan dari dinas perhubungan kota/kabupaaten. Sementara itu, bagi kendaraan

yang tidak laik jalan harus melakukan perbaikan pada kendaraannya supaya menjadi layak jalan.

Oleh sebab itu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pada bidang transportasi darat yaitu dikeluarkannya aturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan ini digunakan sebagai ketentuan pada pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor. Pada Pasal 48 hingga pasal 55 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah menetapkan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor serta mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan melakukan pengujian kendaraan bermotor.

Maksud dan tujuan dari Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) ini ialah untuk:

1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap kondisi pada kendaraan dan melakukan cek kelaikan jalan kendaraan setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Menciptakan kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang tidak layak.
3. Menambah pendapatan asli daerah melalui retribusi, (namun bukan sebagai tujuan utama).

Kewenangan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini berada pada pemerintah daerah kota/kabupaten. Untuk itu salah satu kota yang telah menerapkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini adalah Kota Tanjungpinang yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yaitu pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana yang telah dijelaskan dalam rencana strategis (Renstra) pada Dinas

Perhubungan Kota Tanjungpinang dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki 7 kabupaten/kota diantaranya adalah kota Tanjungpinang yang juga merupakan ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjung Pinang merupakan kota yang sedang berkembang, selain itu kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah kendaraan yang cukup banyak di daerah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh sebab itu tidak sedikit yang menimbulkan permasalahan dikalangan masyarakat, seperti asap yang ditimbulkan oleh gas emisi kendaraan, ketika gas emisi kendaraan terlalu berlebih disuatu lingkungan maka akan menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan, gas emisi merupakan salah satu standar pengujian kelaikan kendaraan. Bukan hanya masalah gas emisi, kendaraan tidak layak beroperasi juga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 49 ayat (2) Bagian Ketiga tentang Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi:

- a. Uji Tipe, dan
- b. Uji berkala

Uji Tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe kendaraan. (Pasal 50 UU No. 22 Tahun 2009).

Dalam hal ini uji tipe yang dimaksud terdiri dari :

1. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan dalam keadaan lengkap, dan
2. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Sedangkan uji berkala sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan (Pasal 53 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009). Namun mengingat keterbatasan fasilitas dan peralatan pengujian yang ada, maka kewajiban uji tersebut saat ini masih dibatasi pada jenis kendaraan bermotor tertentu saja, yaitu mobil barang, mobil bus, kendaraan khusus, dan angkutan umum. Jenis-jenis kendaraan tersebut yang wajib untuk pemeriksaan dan pengujian laik jalan kendaraan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan atas dasar turunan dari peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan. Pengujian kendaraan bermotor mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis diatur dalam peraturan menteri ini guna mengontrol dan sebagai acuan dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor pasal 1 memuat ketentuan umum sebagai berikut:

1. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempel dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Uji berkala adalah pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
3. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
4. Pengujian kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
5. Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh direktur jenderal.

Pada pasal 13 ayat 1 bagian kedua tentang pengujian laik jalan kendaraan,

paling sedikit meliputi uji:

- a. Emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang
- b. Tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot
- c. Kemampuan rem utama
- d. Kemampuan rem parkir

- e. Kincup roda depan
- f. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama
- g. Akurasi alat petunjuk kecepatan
- h. Kedalaman alur ban
- i. Daya tembus cahaya pada kaca.

Sedangkan Pada pasal 16 ayat 2 bagian kedua tentang persyaratan uji berkala kendaraan bermotor, peralatan uji utama paling sedikit meliputi:

- a. Alat uji emisi gas buang
- b. Alat uji ketebalan asap gas buang
- c. Alat uji suara kebisingan klakson/dan atau knalpot
- d. Alat uji rem
- e. Alat uji lampu
- f. Alat uji kincup roda depan
- g. Alat uji petunjuk kecepatan
- h. Alat pengukur kedalaman alur ban
- i. Alat pengukur berat
- j. Alat pengukur dimensi
- k. Alat uji daya tembus cahaya pada kaca.

Adapun standar yang harus dipenuhi pada setiap kendaraan bermotor agar suatu kendaraan tersebut dinyatakan layak jalan, untuk itu setiap kendaraan yang di uji harus memenuhi ambang batas layak jalan yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan meliputi:

1. Uji emisi gas buang dan ketebalan asap (Gas analyzer and smoke tester).
Standart maksimum C = 4,5% dan HC = 1200 ppm dan ketebalan asap 50%.
2. Pengukuran penyimpangan kecepatan (Speedometer Tester) dengan ketentuan 10% sampai 15%
3. Pengukuran penyimpangan sikap roda depan (Slide Slip Tester) dengan standart -5 mm permenit dengan kecepatan 5 km per jam.
4. Pengukuran efisiensi gaya rem (Brake Tester), dengan standart efisiensi kekuatan minimal 50% dengan catatan penyimpangan roda kanan dan kiri max 30%
5. Penimbangan berat kendaraan
6. Pengukuran kemampuan pancar lampu kendaraan (Head Light Tester) dengan standart minimal 12.000 candela untuk lampu jauh dengan penyimpangan kanan 0,34' dan penyimpangan kiri 1,09'.
7. Pemeriksaan bagian bawah kendaraan, yakni meliputi pemeriksaan tingkat kelonggaran (suspensi, kemudi dll).
8. Pengukuran tingkat kebisingan suara (Sound Level Tester) dengan standart 90-118 dB.

Dalam rangka menerapkan pelaksanaan uji kendaraan bermotor yang lebih optimal, pemerintah kota Tanjungpinang juga telah mengeluarkan peraturan daerah kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Pada pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan tujuan dari peraturan daerah ini adalah:

- a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dijalan

- b. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan
- c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dan
- d. Menetapkan jenis pelayanan, persyaratan dan besaran tarif dari retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Dari beberapa jenis kendaraan bermotor yang wajib melakukan pengujian kendaraan, disini penulis memilih untuk meneliti pada kendaraan mobil barang. Karena kendaraan mobil barang merupakan salah satu transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan di Kota Tanjungpinang, untuk itu kendaraan mobil barang harus memenuhi kenyamanan, keamanan, dan kelaikan jalan bagi pengguna jalan lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dinas perhubungan Kota Tanjungpinang melalui seksi pengujian kendaraan bermotor dalam menjalankan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini dinilai masih belum berjalan dengan optimal dan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1 Jumlah Kendaraan yang melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kendaraan Mobil Barang di Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang Tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah Uji Kendaraan (Mobil barang)
1	2021	417
2	2020	430
3	2019	4168
4	2018	4156
5	2017	4842

Sumber : Seksi PKB Dishub Kota Tanjungpinang, 2022

Dari tabel diatas merupakan angka jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan bermotor pada jenis kendaraan mobil barang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Jika dilihat dari jumlah uji kendaraan pada seksi pengujian kendaraan bermotor Kota Tanjungpinang, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan pada mobil barang terbanyak yaitu pada tahun 2017, sedangkan jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan pada mobil barang paling terendah yaitu pada tahun 2021. Hal tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak pemilik kendaraan pada mobil barang yang tidak melakukan proses pengujian kendaraan bermotor, serta masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor guna memberikan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor.

Tabel I. 2 Jumlah Emisi Gas Buang Pada Kendaraan Mobil Barang di Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2021

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	
		Lulus Uji Emisi	Tidak Lulus Uji Emisi
1	2021	390	27
2	2020	392	38

Sumber : Seksi PKB Dishub Kota Tanjungpinang , 2022

Berdasarkan dari tabel diatas merupakan jumlah kendaraan mobil barang yang lulus uji dan tidak lulus uji emisi gas buang dari tahun 2020-2021. Dari data diatas menunjukkan bahwa masih ada ditemukannya kendaraan mobil barang yang tidak memenuhi standar lulus uji emisi gas buang sesuai dengan peraturan pemerintah No.55 Tahun 2015 tentang Kendaraan. Maka dari itu dengan diadakannya pengujian kendaraan bermotor ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai pemilik kendaraan

untuk memeriksa atau mengecek kelayakan jalan pada kendaraan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali agar kendaraan yang digunakan layak jalan dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Tabel I. 3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Di Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

Langkah Awal	1	Kendaraan wajib uji datang ke pusat pengujian kendaraan bermotor
Langkah Utama	2	Pemohon mendaftarkan dan menyerahkan berkas persyaratan
	3	Melakukan pembayaran retribusi
	4	Pemeriksaan Pra Uji
	5	Pemeriksaan secara teknis/alat: Pemeriksaan susunan, perlengkapan, ukuran, rumah-rumah, rancangan teknis kendaran bermotor, berat kendaran, emisi gas buang, sistem rem, sistem penerangan, pemeriksaan tingkat kebisingan, dan perlengkapan lainnya.
	6	Pengesahan hasil uji: Jika kendaraan tidak laik jalan/tidak lulus uji maka pemilik kendaraan dinyatakan harus memperbaiki kerusakan sesuai rekomendasi kerusakan pada formulir, pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan pengujian ulang. - Apabila tidak melakukan pengujian ulang sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka pemilik kendaraan harus melakukan pendaftaran ulang dan membayar biaya uji kendaraan berkala. - Jika kendaraan bermotor telah laik jalan dalam hasil pengujian maka pejabat pengesahan hasil uji akan mengeluarkan kartu uji dan tanda lulus uji.
	7	Pemasangan tanda lulus uji.
	8	Penyerahan hasil dan tanda lulus uji (masa berlaku selama 6 bulan)
Langkah Akhir	8	Penyerahan hasil dan tanda lulus uji (masa berlaku selama 6 bulan)

Sumber : Seksi PKB Dishub Kota Tanjungpinang, 2022

Dari tabel diatas merupakan standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan sebagai ketentuan dalam menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang melalui Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor juga telah menetapkan beberapa tahapan jenis kegiatan dan waktu pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Terlihat dari tabel dibawah:

Tabel I. 4 Tahapan Jenis Kegiatan dan Waktu Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Oleh Seksi Pengujian kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

No	Kegiatan	Waktu
1	Mengajukan permohonan pendaftaran pengujian kendaraan dengan membawa kendaraan yang akan diuji	1 menit
2	Menerima persyaratan pendaftaran, melakukan pengecekan dengan data yang sudah ada, selanjutnya memberikan nomor urut pendaftaran	3 menit
3	Pembayaran retribusi pengujian sesuai dengan tipe kendaraan melalui pembayaran sistem online selanjutnya memberikan surat pemeriksaan unit (SPU)	3 menit
4	Melakukan Pra Uji	5 menit
5	Melakukan pemeriksaan emisi gas buang	5 menit
6	Melakukan pemeriksaan kolong kendaraan	5 menit
7	Melakukan pemeriksaan head light tester	5 menit
8	Melakukan pemeriksaan sound level tester	3 menit
9	Melakukan pemeriksaan side slip tester	3 menit

10	Melakukan pemeriksaan brake tester dan axle load tester	8 menit
11	Menetapkan hasil pengujian	3 menit
12	Pencetakan stiker uji, kartu uji (smart card) dan sertifikat uji	9 menit
13	Menyerahkan stiker uji, kartu uji (smart card) dan sertifikat lulus uji	1 menit
14	Melakukan proses penempelan/pemasangan stiker tanda lulus uji pada kaca kendaraan depan mobil	3 menit
14	Melaksanakan pengarsipan	3 menit
Total Waktu Pelayanan		60 Menit

Sumber: Seksi PKB Dishub Kota Tanjungpinang, 2022

Kendaraan Bermotor yang telah memenuhi syarat-syarat teknis laik jalan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2021 pasal 4 ayat 2 harus dilakukan pemeriksaan berupa pengujian secara berkala yang didahului dengan adanya permohonan pihak yang berkepentingan kepada Dinas Perhubungan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB)/faktur asli atau fotokopi
- b. Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) asli atau fotokopi
- c. KTP asli atau fotokopi dan/atau surat kuasa dari pemilik
- d. Surat uji tipe (SUT) fotokopi
- e. Sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) asli
- f. Surat keputusan rancang bangun kendaraan bermotor (SKRB) fotokopi
- g. Surat penentuan sifat kendaraan (SPSK) asli atau fotokopi
- h. Surat keterangan tera untuk kendaraan tangki, dan
- i. Tanda lunas retibusi uji kendaraan bermotor.

Tabel I.5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Oleh Seksi Pengujian kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

Jenis Kendaraan	Tarif
Mobil Penumpang Umum	Rp 55.000
Mobil Bus 9 tempat duduk s/d 28 tempat duduk	Rp 60.000
Mobil Bus 29 tempat duduk s/d 40 lebih tempat duduk	Rp 70.000
Mobil Barang JBB < 10.000 kg: Pick up, pick-up box, truck box/tangki, light truck, light truck box/tangki/molen	Rp 60.000
Mobil Barang JBB > 10.000 kg: Dump truck, dump truck box/tangki, head tractor	Rp 70.000
Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp 65.000
Kendaraan Khusus: Ambulan, Mobil derek, kendaraan penyandang cacat	Rp 70.000
Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga)	Rp 55.000

Sumber : Seksi PKB Dishub Kota Tanjungpinang, 2022

Berdasarkan tabel diatas merupakan tarif biaya administrasi pengujian kendaraan bermotor pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam peraturan daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Kemudian dalam memberikan layanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang memiliki jumlah total 9 (sembilan) orang pegawai yang terdiri dari kepala seksi, petugas penguji, dan petugas administrasi, terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel I. 6 Jumlah Pegawai Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	1
2	Petugas Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	4
3	Petugas Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang	4

Sumber : Seksi PKB Dishub Kota Tanjungpinang, 2022

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kota Tanjungpinang ada beberapa hal yang perlu dicermati pada Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, penyebab kurang optimal atau maksimalnya Pelaksanaan Pengujian Kendaran Bermotor (PKB) pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang disebabkan oleh beberapa kendala/faktor antara lain :

1. Masih banyak ditemukan kendaraan mobil barang yang tidak melaksanakan wajib uji kendaraan pada seksi pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, sehingga menurunnya jumlah uji kendaraan pada mobil barang. Terlihat pada tabel I.1
2. Kurangnya sosialisasi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap supir atau pemilik kendaraan mobil barang mengenai adanya perubahan sistem pengujian kendaraan yang sebelumnya masih dilakukan pemeriksaan uji secara manual dan sekarang sudah menggunakan alat uji, sehingga adanya pemilik kendaraan yang enggan dan kurang yakin untuk menguji kendaraannya.

3. Adanya pemilik kendaraan mobil barang yang kurang memperhatikan kondisi pada kendaraan yang digunakan di jalan, sehingga masih ada ditemukannya kendaraan yang tidak lulus pada uji emisi gas buang. Terlihat pada tabel I.2.

Berdasarkan fenomena diatas menjelaskan bahwa adanya masalah dalam penerapan pada Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas dan melihat keadaan yang terjadi pada lokasi penelitian mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor bahwa dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

“Bagaimanakah Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang)”.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang).

- b. Untuk mengetahui faktor/kendala dalam Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang (Studi Kendaraan Mobil barang).

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait diantaranya :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu administrasi publik dan dapat digunakan sebagai sumber bacaan dan acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan kajian yang sama.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam memberikan layanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan uji kendaraan di Kota Tanjungpinang
- c. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, maka perlu diberikan beberapa konsep dan ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan yang dapat memberikan solusi yang erat kaitannya dengan masalah penelitian ini yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, agar dapat memberikan pemecahan penelitian yang jelas dalam mengetahui dan membahas diantaranya :

1. Konsep Administrasi

Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengketik, kegiatan menyusun keterangan-keterangan secara sistematis, dan pencatatan-pencatatannya secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bilamana akan dipergunakan lagi baik secara terpisah-pisah maupun sebagai keseluruhan yang tidak terpisahkan, dan segala sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*). Jadi pengertian administrasi sebagai ketatausahaan (*clerical work*) merupakan sebagian kecil dari administrasi. (Soewarno: 1994)

Administrasi dalam arti luas hakikat dan arti administrasi sesungguhnya sangat luas. Sesungguhnya istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

Siagian (2003:2) berpendapat Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Silalahi administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli 2005:20). Berangkat dari teoritis batasan konsep administrasi baik atau kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan sekaligus berlangsung didalamnya.

Memandang kerjasama manusia mencapai tujuan sebagai objek studi ilmu administrasi, maka ada 10 dimensi yang perlu dipahami dalam konsep administrasi yang dikemukakan oleh Atmosudirdjo (dalam Zulkifli, 2005:21-23) sebagai berikut:

- a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam suatu organisasi.
- b. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administrasi yang sehat maka organisasi tidak akan sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan atau energi atau hayat adalah administrator yang harus pandai menggerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas para manajer, staff, dan personil lainnya.
- c. Administrasi merupakan suatu fungsi tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para manajer dan staff.
- d. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan badan pimpinan dari pada suatu organisasi.
- e. Administrasi merupakan suatu seni (*art*) yang memerlukan bakat, ilmu, pengetahuan dan pengalaman.
- f. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

- g. Administrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan sosial yang tertentu (*administrative behaviour or administration as special type of social behaviour*) yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu tipe tingkah laku manusia tertentu (*special type of human behaviour*)
- h. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tata cara memerlukan kemampuan atau mengerjakan sesuatu yang memerlukan kemampuan, kemahiran, keterampilan, (skills) yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- i. Administrasi merupakan sistem yang tertentu, yang memerlukan input, transformasi, pengolahan dan output tertentu.
- j. Administrasi merupakan sistem tipe manajemen tertentu yang merupakan **over all management** daripada suatu organisasi. Pada hakekatnya manajemen merupakan pengendalian dari sumber daya-sumber daya menuju ketercapaian suatu prapta (objektive) tertentu. Sumber daya-sumber daya (resources) dimaksud meliputi; orang-orang (man), uang (money), mesin-mesin (machine), bahan atau peralatan (materials), metode cara teknis (methods-technology), ruang (space), tenaga atau energy (energy, dan waktu (time). Dalam istilah administrasi tercakup adanya pesan, tugas tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi.

Rosenbloom and Goldavan mengatakan bahwa administrasi publik adalah penggunaan kepemimpinan secara politis dan berbagai proses dan teori yang sah untuk menjalankan tugas-tugas legislatif, eksekutif dan yudisial dalam penyediaan peraturan bagi pelayanan seluruh atau sebagian masyarakat (dalam Wirman 2012:20). Sedangkan menurut Levine, Peter, and Thomson berpendapat administrasi publik memusatkan perhatiannya ada berbagai kebijakan dan program organisasi pemerintah, termasuk perilaku para pejabat (yang biasanya tidak dipilih) yang secara formal bertanggung jawab atas perilaku mereka (dalam Wirman 2012:21).

Banyak definisi dari administrasi publik dan menurut Woodrow Wilson mendefinisikan administrasi publik adalah

“Urusan atau praktik urusan pemerintahan karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/swasta” (dalam Wirman,2012:21).

Sedangkan menurut Marshall Edward Dimock & Glady Ogden Dimock mengatakan administrasi publik adalah

“Penyelenggaraan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara politis. Meskipun demikian, administrasi publik bukan sekedar teknik atau pelaksanaan program-program secara teratur, melainkan juga berkenaan dengan kebijakan umum (*Policy*) karena didalam dunia modern, birokrasi merupakan pembuat kebijakan pokok dalam pemerintahan” (dalam Wirman, 2012:22).

Dari berbagai defenisi administrasi publik diatas bisa disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu proses kerjasama kelompok yang terdiri dari aparatur negara dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pencapaian negara secara efektif dan efisien.

Administrasi Publik menurut Wilson (dalam Syafri, 2012;21 administrasi publik adalah urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan kegiatan dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/swasta.

Sedangkan menurut Siagian (2003;7) administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

2. Konsep Organisasi

Menurut Siagian (2003;6) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama secara formal dan terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang

atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau kelompok orang yang disebut bawahan.

Konsep organisasi adalah sebagai wadah pelaksanaan kerjasama dan juga mencakup rangkaian pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan organisasi (Zulkifli, 2005; 74)

Definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut :

1. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.
2. Organisasi sebagai rangkaian hierarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Selanjutnya menurut Chester L. Bernard mendefenisikan organisasi adalah sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi (dalam Sjamsuddin Indradi 2006:19).

Organisasi adalah proses kegiatan ditata/diatur menurut sifat, bidang, jenis urgensinya, kegiatan selaku pimpinan/bantuan staf, maupun pelaksana operasional proses kegiatan tersebut merupakan system usaha kerjasama sekelompok manusia secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fathoni, 2006;4)

Dari beberapa definisi yang sudah disampaikan oleh beberapa para ahli tersebut, maka hal itu dapat membuktikan bahwa dalam hal ini masyarakat dimana pun berada tidak terlepas dari praktik-praktik organisasi dalam kehidupannya. Dilingkungan

masyarakat, baik itu organisasi formal maupun informal akan ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain yang merupakan bentuk organisasi suatu hierarki.

3. Konsep Manajemen

Menurut Stoner, et.al (Zulkifli dan Yogia 2014;17) berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Istilah manajemen (*Management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda.

Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, daya alam (human and natural resources) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan (Siswanto. 2005;9)

Selanjutnya dari penjelasan diatas Siswanto (2005;2) memberi batasan definisi manajemen yaitu manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Menurut Siswanto (2005;3) Elemen fungsi dari dasar manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, pengendalian/pengawasan.

1. Perencanaan, yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/periode tertentu serta tahapan/langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan tujuan dari setiap organisasi dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan inilah yang menjadi pegangan dalam aktivitas selanjutnya. Tujuan yang ingin direalisasikan tersebut harus tetap diperhatikan, dipedomani, dan dijadikan bacaan oleh setiap elemen organisasi, khususnya manajer yang memegang kemudi organisasi.

2. Pengorganisasian, yaitu suatu proses dan rangkaian dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif. Dengan demikian, kewajiban yang dijalankan memberikan saluran yang efektif bagi bagi setiap aktivitas yang dilaksanakan. Jadi, pengorganisasian berarti menetapkan sistem organisasi yang dianut organisasi dan mengadakan distribusi kerja agar mempermudah dalam merealisasikan tujuan.
3. Pengarahan, yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok forml dan untuk pencapaian tujuan bersama. Agar organisasi selalu dinamis, manajer haruslah memberikan perintah dan saran yang diberikan oleh manajer kepada bawahan akan memberikan dampak negatif dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah bawahan ragu meaksanakan kerja sehingga penyelesaian pekerjaan akan mengalami keterlambatan.
4. Pemotivasian, yaitu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan kegairhan kerja serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan sesuatu kegiatan yang semstinya. Agar terciptanya keadaan kerja yang menggairahkan, manajer harus melaksanakan fungsinya, memotivasi bawahannya. Dengan demikian individu tersebut didorong berprilaku dan bertindak mencapai tujuannya.
5. Pengendalian/pengawasan, yaitu proses dan rangkaian kegiatan untuk menguahkan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut,diadakan suatu tindakan perbaikan. Pengendalian dilakukan untuk membimbing bawahan agar bawahan melakukan pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau dengan kata lain untuk mencari penyimpangan sehingga tidakan perbaikan dapat dilakukan kearah rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Lee (dalam Pradja, 2012;80) menjelaskan bahwa manajemen sebagai seni dan ilmu, dalam manajemen terdapat strategi memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

“Manjemen mengacu pada suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan agar diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain.”
Efektif berarti semua unsur sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat

diberdayakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sementara efisien berarti pekerjaan yang telah ditentukan manajer dapat dilakukan dan diselesaikan oleh para pekerja sesuai dengan anggaran. Kondisi tersebut akan dicapai apabila organisasi melakukan kegiatan koordinasi (dalam Karyoto, 2015;2).

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat di dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikianrupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya, karena itulah manusia juga di perlukan di manajemen.

Menurut Hasibuan (2012;10) Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya Hasibuan (2012:7) mengatakan bahwa dengan adanya manajemen daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan.

Unsur-unsur manajemen itu anatara lain adalah :

- Man : Man dalam organisasi publik diartikan sebagai sesuatu yang sangat menentukan karena manusia yang membuat tujuan melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tanpa manusia tidak akan ada proses kerja.
- Money : Uang penting sebagai alat ukur dan alat ukur mengenai suatu usaha (besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang).
- Materials (bahan-bahan/perlengkapan) : Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material.
- Machines (alat-alat) : Mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja,

penggunaannya sangat tergantung kepada manusia serta mempermudah tujuan hidup manusia.

- Method (cara-cara kerja) : Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung pada cara pelaksanaannya dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan.
- Market : Market dalam organisasi publik diartikan sebagai masyarakat atau warga negara anggota organisasi.

Dalam perkembangannya unsur man (manusia) telah berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut sebagai sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari khusus pada satu unsur manajemen tersebut yaitu man (manusia). Tanpa sumber daya manusia, maka sumber daya lainnya kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi, maka untuk itu sangat diperlukan manajemen sumber daya manusia sebagai pengatur bagaimana untuk menjalankan sebuah organisasi yang dibentuk dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada.

Nawawi (2008:41) yang menyebutkan bahwa ada tiga pengertian sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan)
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia (SDM) adalah potensi yang merupakan aset dan fungsi sebagai modal (non material dan non finansial) didalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi sebuah organisasi.

Dengan adanya Manajemen Sumber Daya Manusia, mak sumber daya manusia dapat lebih diarahkan kepada kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan organisasi dengan menggerakkan atau memanfaatkan atau mendayagunakan sumber daya yang lainnya untuk dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Martoyo (2000:19) yang merincikan tujuan dari manajemen Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Organisasional, adalah untuk tercapainya efektivitas maksimal dari sebuah organisasi.
2. Tujuan Fungsional adalah : bahwa secara fungsional tujuannya harus sesuai dengan tujuan organisasi yang lebih besar.
3. Tujuan Personal, yaitu : kepentingan personal atau individual dalam organisasi juga harus diperhatikan oleh setiap manajer.

Selanjutnya menurut Martoyo (2000:25) yang mengatakan bahwa aktivitas manajemen sumber daya manusia adalah segala tindakan ataupun langkah-langkah yang dilakukan untuk menyediakan dan mempertahankan suatu jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tepat bagi organisasi agar tujuan manajemen tercapai dengan baik dan tepat.

Sedangkan definisi yang dikemukakan Kinggundu manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personil (pegawai) bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional (dalam Faustino. 2003;4).

Fungsi manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Hasibuan (2012;21-23) antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan (*Human Resources Planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi (*organization chat*)

3. Pengarahan (*Directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
4. Pengendalian
Pengendalian (*Controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
5. Pengadaan (*procrutmen*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
6. Pengembangan
Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.
8. Pengintegrasian (*Integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.
9. Pemeliharaan
Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.

10. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

11. Pemberhentian

Pemberhentian (*Separation*) adalah putusannya hubungan kerja seseorang dari perusahaan.

5. Konsep Pelaksanaan/Implementasi

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti buatan, sifat dan akhiran-kan yang berfungsi untuk membentuk kata benda menjadi pelaksana, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan, “pelaksanaan adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun, sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan”.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi yang paling mendasar, dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating (pelaksanaan) justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Pelaksanaan/implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan, tidak lebih dan kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang dapat digunakan:

1. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program.
2. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik.

Sehubung dengan kata implementasi di atas, Pressman dan Wildavsky (1978 dikutip dari Tachjan:24) mengemukakan bahwa, *“Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete”*. Maksudnya membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan. Selanjutnya, mereka juga mengatakan bahwa pembuat kebijakan seharusnya tidak menjanjikan hal-hal yang tidak dapat dipenuhi karena implementasi kebijakan membutuhkan sistem kontrol dan komunikasi top-down serta sumber daya yang dapat menjalankan tugas implementasi tersebut.

Menurut Harsono (dalam Nugroho 2004:67) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Edward III, *Implementation is the stage of policy making between the stage of policy for the people whom it affects*. Hill & Hupe (2010:7) mendefinisikan bahwa *implementation is a complicated process or rather sub-process, or rather sub-process*. Kebijakan adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan oleh pemerintah dan kebijakan tersebut berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintahan. (dalam Ali & Hafis 2015:55).

Adapaun model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh George C. Edwards 1980 (dikutip dari Agustino, 2008:150) dinamakan dengan *direct and indirect impact on implementation* dalam pendekatan ini sangat terlihat mengacu pada fenomena, Edwards III menawarkan empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino,2014:139), mendefinisikan pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Van Meter dan Van Horn dalam subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen impkementasi.

2. Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumberdaya manusia maupun sumber daya non manusia.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

4. Karakteristik agen pelaksana

Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
- b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
- c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Van meter van horn mengemukakan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan disposisi implementor. Dengan demikian masing-masing variabel merupakan faktor yang signifikan yang saling mempengaruhi untuk tercapainya kinerja pelaksanaan kebijakan tersebut.

Bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah serangkaian kegiatan atau usaha-usaha yang dilakukan untuk menjalankan semua kebijakan atau program yang telah dibuat dan ditetapkan.

Menurut Dniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979, dikutip dari Abdul Wahab, 2010;65) Model yang dikemukakan disebut *A Frame work For Implementation Analysis* (kerangka analisis implementasi) Mazmnia dan Paul A. Sabatier berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi.

6. Konsep Kebijakan

Kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang” , dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan

istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan garand design (Suharno : 2009 : 11).

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino :

“Mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimana kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

7. Konsep Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan (UU No. 22 Tahun 2009).

Persyaratan teknis sebagaimana tertulis dalam pasal 48 ayat 2 UU no. 22 Tahun 2009 yang menjadi salah satu persyaratan kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan raya sebagai berikut:

- a. Susunan
- b. Perlengkapan
- c. Ukuran
- d. Karoseri
- e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya

- f. Pemuatan
- g. Penggunaan
- h. Penggandengan kendaraan bermotor, dan/atau
- i. Penempelan kendaraan bermotor.

Sedangkan persyaratan Laik Jalan sebagaimana tertulis dalam pasal 48 ayat 3 UU No. 22 Tahun 2009 yang juga meliputi salah satu persyaratan kendaraan yang dioperasikan di jalan raya sebagai berikut:

- a. Emisi gas buang
- b. Kebisingan suara
- c. Efisiensi sistem rem utama
- d. Efisiensi rem parker
- e. Kincup roda depan
- f. Suara klakson
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
- h. Radius putar
- i. Akurasi alat petunjuk kecepatan
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

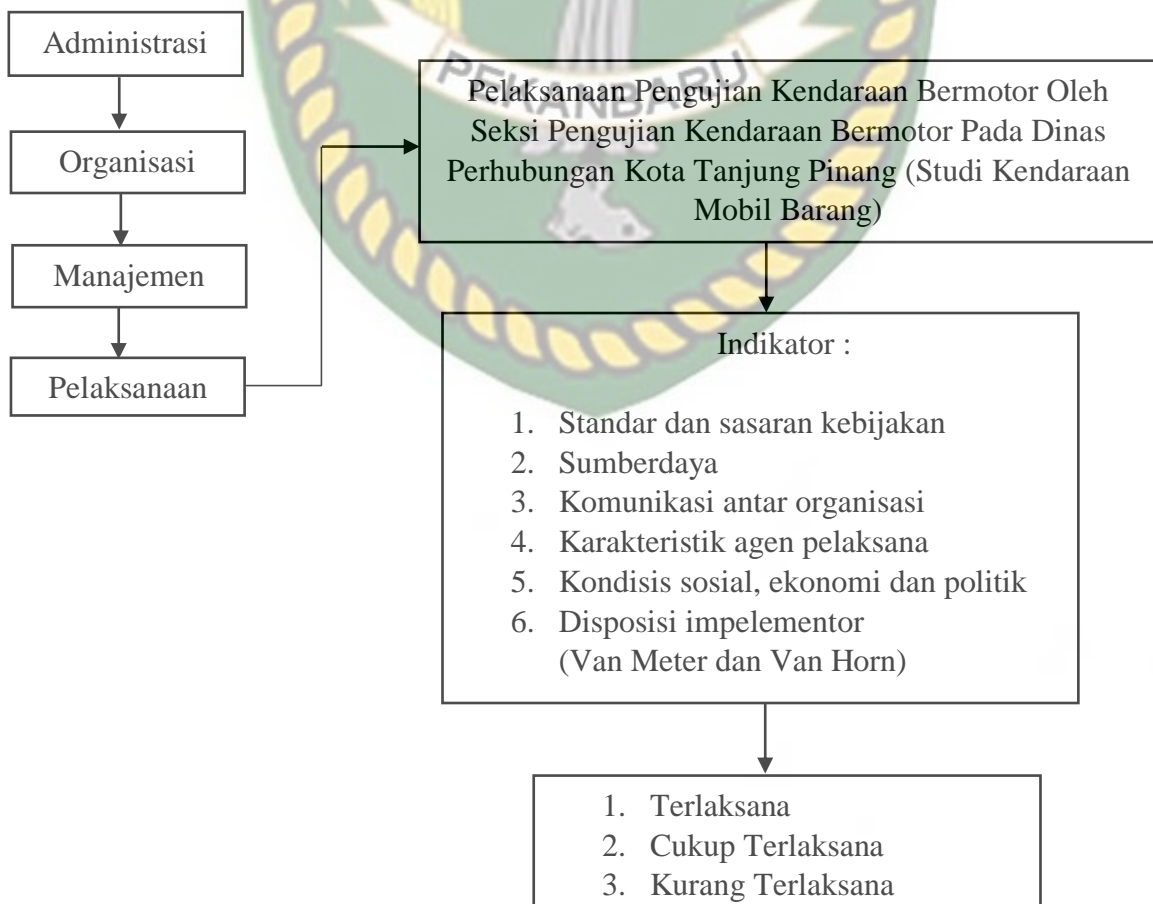
Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik dimana peralatan tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari rangka landasan, bagian-bagian motor penggerak, perangkat penerus daya, bodi kendaraan, perangkat rem, perangkat suspensi/roda, perangkat kemudi beserta kelistrikan yang saling mengadakan interrelasi secara tertib. Kendaraan bermotor, kereta

gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian (UU No. 22 Tahun 2009 pasal 49 ayat 1).

B. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait di dalam variabel penelitian ini tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang secara lebih rinci dapat dilihat pada bagan di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Gambar II. 1 Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang (Studi Kendaraan Mobil Barang).



C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir yang telah penulis jelaskan diatas, serta dihubungkan dengan landasan teori. Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah “Diduga Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang (Studi Kendaraan Mobil Barang)” melalui 6 Indikator yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Komunikasi
4. Karakteristik Agen Pelaksana
5. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
6. Disposisi Implementor

D. Konsep Operasional

1. Administrasi adalah suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan/disepakati.
2. Organisasi adalah wadah/tempat berkumpulnya sejumlah manusia yang saling bekerjasama dalam rangka mencapai suatu yang telah disepakati sebelumnya.
3. Manajemen adalah suatu proses keterampilan melalui orang lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dalam rangka pencapaian tujuan didalam sebuah organisasi.
4. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses kegiatan pemanfaatan sejumlah individu (manusia) sebagai tenaga kerja dalam mencapai tujuan sebuah organisasi.

5. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, pelaksanaan merupakan aktifitas, atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan dan suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna menapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.
6. Pengujian kendaran bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
7. Pengujian kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
8. Pengujian berkala kendaraan bernotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

10. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk mengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kilogram.
11. Mobil Bus adalah bermotor angkutan yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga riu lima ratus) kilogram.
12. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
13. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor penariknya.
14. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
15. Gagal Uji (tidak lulus uji) adalah tidak terpenuhinya persyaratan laik jalan kendaraan ketika diuji.
16. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.
17. Uji Ulang adalah pengujian kembali terhadap kendaraan yang telah selesai perbaikan sesuai dengan yang diperintah penguji akibat tidak lulus uji.

18. Tanda Uji adalah merupakan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa stiker tanda uji yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas-kertas yang memiliki unsur pengaman (sertifikat).
19. Standar dan Sasaran Kebijakan adalah ukuran dan tujuan dari suatu kebijakan atau program pada jangka tertentu, untuk mengukur kinerja pada implementasi kebijakan atau program.
20. Sumber Daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan.
21. Komunikasi Antar Organisasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
22. Karakteristik Agen Pelaksana adalah pusat perhatian yang meliputi organisasi formal dan informal yang terlibat pada pengimplementasian kebijakan
23. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik merupakan respon pelaksana yang meliputi sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan serta pemahaman dari pelaksana terhadap kebijakan
24. Disposisi Implementor merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan.

E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.1 Operasional Pelaksanaan Pengujian kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang (Studi Kendaraan Mobil Barang)

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Pelaksanaan merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. menurut Van Meter dan Van Horn (dalam LeoAgustino, 2014;139).	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang).	Standar dan sasaran kebijakan	a. Standar pengujian kendaraan bermotor b. sasaran pengujian kendaraan bermotor	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Sumber daya	a. Tersedianya jumlah pegawai PKB yang memadai b. Biaya administrasi PKB c. Tersedianya sarana dan alat pendukung PKB	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Komunikasi antar organisasi	a. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat b. Memberikan arahan lisan atau tulisan c. Pemahaman masyarakat sebagai supir/pemilik kendaraan terhadap sanksi	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Karakteristik agen pelaksana	a. Sikap dan tindakan pegawai pada pelayanan PKB b. Bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

		Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik	a. Dampak positif pada pengujian kendaraan bermotor b. Dampak negatif pada kendaraan tidak layak.	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
		Disposisi implementor	a. Kinerja pegawai terhadap tugas dan fungsinya b. Pengetahuan dan pemahaman pegawai terhadap Kebijakan/aturan PKB	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

F. Teknik Pengukuran

Teknik Pengukuran yang peneliti lakukan pada variabel dan indikator pada penelitian ini digolongkan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : Terlaksana, Cukup Terlaksana, dan Kurang Terlaksana.

Adapun pengukuran masing-masing variable Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) adalah sebagai berikut :

- **Ukuran Variabel**

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian

Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator PelaksanaanPengujian Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) 1-33%.

- **Ukuran Indikator Variabel**

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kenadaraan Mobil Barang) 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kenadaraan Mobil Barang) 1-33%.

2. Sumber Daya

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil barang) 1-33%.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Indikator Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) 1-33%.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) 1-33%.

5. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) 1-33%.

6. Disposisi Implementor

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) 1-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang sudah dijelaskan, tergambar bahwa data dan informasi yang akan dikumpulkan melalui kuisisioner, wawancara, pada saat melakukan pra survey dijadikan dasar mendeskripsikan indikator variabel, karena itu tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian survey deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, menurut Nanang Martono (dalam Sudaryono 2018:92) yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena atau gejala sosial secara kuantitatif atau menganalisis bagaimana fenomena atau gejala sosial yang biasanya menggunakan logika deduktif berupaya mencari keteraturan dalam kehidupan manusia, dengan memisahkan dunia sosial menjadi komponen-komponen empiris yang disebut variabel. Alasan penulis menggunakan Metode Kuantitatif ialah, karena penulis hanya mengumpulkan data dengan cara menyebarkan Kuesioner untuk mendapatkan hasil data yang sudah dikumpulkan dengan perhitungan jumlah angka berdasarkan populasi dan sampel.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih penulis mengenai Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Oleh Seksi Pengujian Kendaraan bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang alasan penulis memilih penelitian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang ini adalah karena penulis melihat bahwa adanya permasalahan yaitu masih banyak ditemukan kendaraan-kendaraan yang tidak layak jalan serta kendaraan yang tidak melakukan

kewajibkan ujinya namun masih beroperasi di jalan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas secara lebih mendalam mengenai hal tersebut.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono (2010:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Maka untuk populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah dari Dinas Perhubungan terdiri dari Kepala Bidang angkutan jalan, Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, Petugas Penguji, Petugas Administrasi Penguji dan masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan mobil barang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2006:91). Peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representative atau mewakili. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seperti yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel III.1 Populasi dan Sampel Penelitian pada Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang.

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang Angkutan Jalan	1	1	100%
2	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	1	1	100%
3	Petugas Penguji	4	4	100%
4	Petugas Administrasi	4	4	100%
5	Pemilik Kendaraan (Mobil Barang)	-	60	-
Jumlah		-	70	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun cara penarikan sampel yang digunakan berdasarkan pada tabel diatas yaitu kepala bidang angkutan jalan, kepala seksi pengujian kendaraan bermotor, petugas penguji, dan petugas administrasi didalam pemilihan sampel peneliti menggunakan teknik sensus karena jumlah populasi dibawah 100. Sedangkan untuk pemilik kendaraan mobil barang dengan populasi tidak terhingga, penulis mengambil sampel dengan jumlah 60 sampel saja dengan menggunakan teknik Incidental Sampling. Menurut Sugiyono (2016) Incidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi jenis sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, angket (kuesioner) dan observasi sebagai sampel kemudian data ini dianalisa tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data informasi dan keterangan dari instansi yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang (Studi Kendaraan Mobil Barang). Berupa sejarah organisasi, visi dan misi organisasi, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang serta peraturan tertulis berupa Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi ketertarikan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini untuk pengambilan data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

1. Kuisioiner

Yaitu suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan tertulis pada Kepala Bidang Angkutan Jalan, Petugas

Penguji, Petugas Administrasi di dinas perhubungan kota Tanjungpinang dan Masyarakat yang melakukan uji kendaraan, menyangkut masalah yang diteliti untuk diisi sesuai alternative jawaban yang telah disediakan. Untuk menggali informasi tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

2. Wawancara

Yaitu, penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dengan menyiapkan beberapa instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis tentang wewenang Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang yang dijadikan oleh penulis sebagai alat bantu untuk melakukan wawancara responden dalam mendapatkan data mengenai jumlah pegawai, jumlah kendaran wajib uji, standar pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan dll.

3. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian. Dengan pengamatan mengenai Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaran Bermotor Di Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) dalam proses melakukan pemeriksaan teknis uji kendaraan bermotor.

4. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung terhadap subjek penelitian, melalui dokumen seperti UU Republik Indonesia tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang ada pada instansi atau lembaga yang relevan untuk menyusun deskriptif wilayah penelitian bahan bukti, dan bahan analisa.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian survey deskriptif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut dikelompok dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada obyek penelitian sebagaimana adanya suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan pada tata cara ilmiah.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaran Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) dimulai dari bulan Mei tahun 2021, seperti rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel III. 2 Jadwal Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang 2022

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																							
		Mei-Juni				Juli				Agustus				Sept				Okt-Des				Jan-Feb			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP					■	■	■	■																
3	Revisi UP									■	■	■	■												
4	Revisi Kuisisioner													■	■	■	■								
5	Rekomendasi Survey																	■	■	■	■				
6	Survey Lapangan																					■	■	■	■
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konferehensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Pengadaan Skripsi																								

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Tanjungpinang

Pemerintah kota Tanjungpinang merupakan salah Kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau dan menyandang sebagai Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjungpinang di pimpin oleh seorang walikota yang dilantik dan diangkat oleh Gubernur Kepulauan Riau.

Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang berada pada 0°51' sampai dengan 0°59' Lintang utara dan 104°34' Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai 23.950 Ha atau ± 258.82 km². Sebelum menjadi kota otonom kota ini terletak di pulau Bintan dan berada di beberapa pulau kecil yaitu Pulau Dompok, Pulau Penyengat, Pulau Terkulai, Pulau Los, Pulau Basing, Pulau Setakap dan Pulau Bayan. Kota ini memiliki luas daratan sekitar ± 150.86 km² dan luas lautan sekitar ± 107.96 km². Kota Tanjungpinang merupakan wilayah yang sangat strategis, dimana kota ini berbatasan dengan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan Negara Singapura sebagai pusat perdagangan dunia. Kota ini juga terletak pada posisi yang berbatasan dengan perdagangan dan pelayaran dunia, antara timur dan barat yaitu Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan.

Kota Tanjungpinang kental dengan sejarah, budaya, dan juga adat istiadat melayu. Banyak peninggalan sejarah yang terdapat di kota ini khususnya pada potensi cagar budaya dalam bentuk bangunan arsitektual, makan, dan juga melayu. Kota Tanjungpinang berperan penting dalam sejarah perkembangan kawasan ini, karena letaknya yang sangat strategis pada posisi perdagangan dan pelayaran dunia antara

timur dan barat serta antara samudera hindia dengan laut cina selatan. Hal ini menjadikan kepulauan riau sebagai salah satu sentral perdagangan dan pelayaran dikawasan selat malaka. Kedudukan dan peranan ekonomis telah mendorong pulau bintan dan kawasan yang ada disekitarnya berkembang menjadi tempat yang dikenal luas sehingga ramai dikunjungi. Salah satu tempat yang ikut berperan sebagai daerah pendukung adalah Kota Tanjungpinang yang terletak dibagian Timur Teluk Bintan. Fungsi maupun kedudukan Kota Tanjungpinang sebagai pusat perdagangan menjadikan kota tersebut salah satu kota penting. Salah satu pulau yang ada di Kota Tanjungpinang yang sangat kental dengan sejarah yaitu pulau penyengat yang merupakan tempat kelahiran pahlawan bahasa Raja Ali Haji yang dikenal dengan Gurindam 12 (duabelas).

B. Kondisi Transportasi Kota Tanjungpinang

Salah satu unsur penting dalam peningkatan pembangunan ekonomi di kota Tanjungpinang adalah tersedianya prasarana dan sarana yang memadai, baik kuantitas maupun kualitas. Dengan adanya daya dukung prasarana dan sarana yang baik maka akan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas perekonomian sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat untuk diwilayah tersebut. Salah satunya adalah transportasi. Transportasi diwilayah kota Tanjungpinang yaitu bertujuan meningkatkan arus lalu lintas orang, barang, dan jasa agar bisa mendorong peningkatan pada pendapatan taraf hidup masyarakat.

Dilihat dari letak Geografis kota Tanjungpinang, Sarana Transportasi memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan atau aktivitas ekonomi maupun non ekonomi. Kota Tanjungpinang memiliki batas daratan dengan kabupaten Bintan,

dimana lalu lintas telah menjadi penghubung bagi satu wilayah ke wilayah lainnya+. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, tertib, teratur, dan nyaman, serta efisien.

Di wilayah kota Tanjungpinang transportasi sangatlah penting, salah satunya pada transportasi mobil barang guna dalam membantu aktivitas keluar masuknya barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya khususnya pada kota Tanjungpinang. Untuk wilayah kota Tanjungpinang saat ini keadaan transportasi mobil barang sangatlah memperhatikan dimana masih banyak sekali ditemukan kendaraan bermotor mobil barang yang kurang layak jalan namun masih tetap beroperasi dengan bebas, sehingga bisa memberikan dampak yang buruk bagi pengguna kendaraan lainnya seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian dari segi materi, serta pencemaran udara dan lingkungan akibat dari emisi gas kendaraan, dan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban lalu lintas dan lain-lain.

Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai permasalahan maka perlu dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang melalui Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam rangka memberikan standar layak jalan pada kendaraan mobil barang yang beroperasi di jalan raya, yang dimana tujuannya yaitu menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum. Pelaksanaan pengujian ini merupakan tanggung jawab pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.

C. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah kota Tanjungpinang sebagai pembantu kepala daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Sebagai unsur pelaksana urusan-urusan pemerintahan dibidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang memiliki visi dan misi dalam menjalankan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah kota Tanjungpinang. Berikut Visi dan Misi dari Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

Visi

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal, Efektif, dan Efisien Dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Tanjungpinang”.

Misi

- Meningkatkan Pelayanan di Bidang Transportasi;
- Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan;
- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana di Bidang Transportasi.

D. Struktur Keorganisasian Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

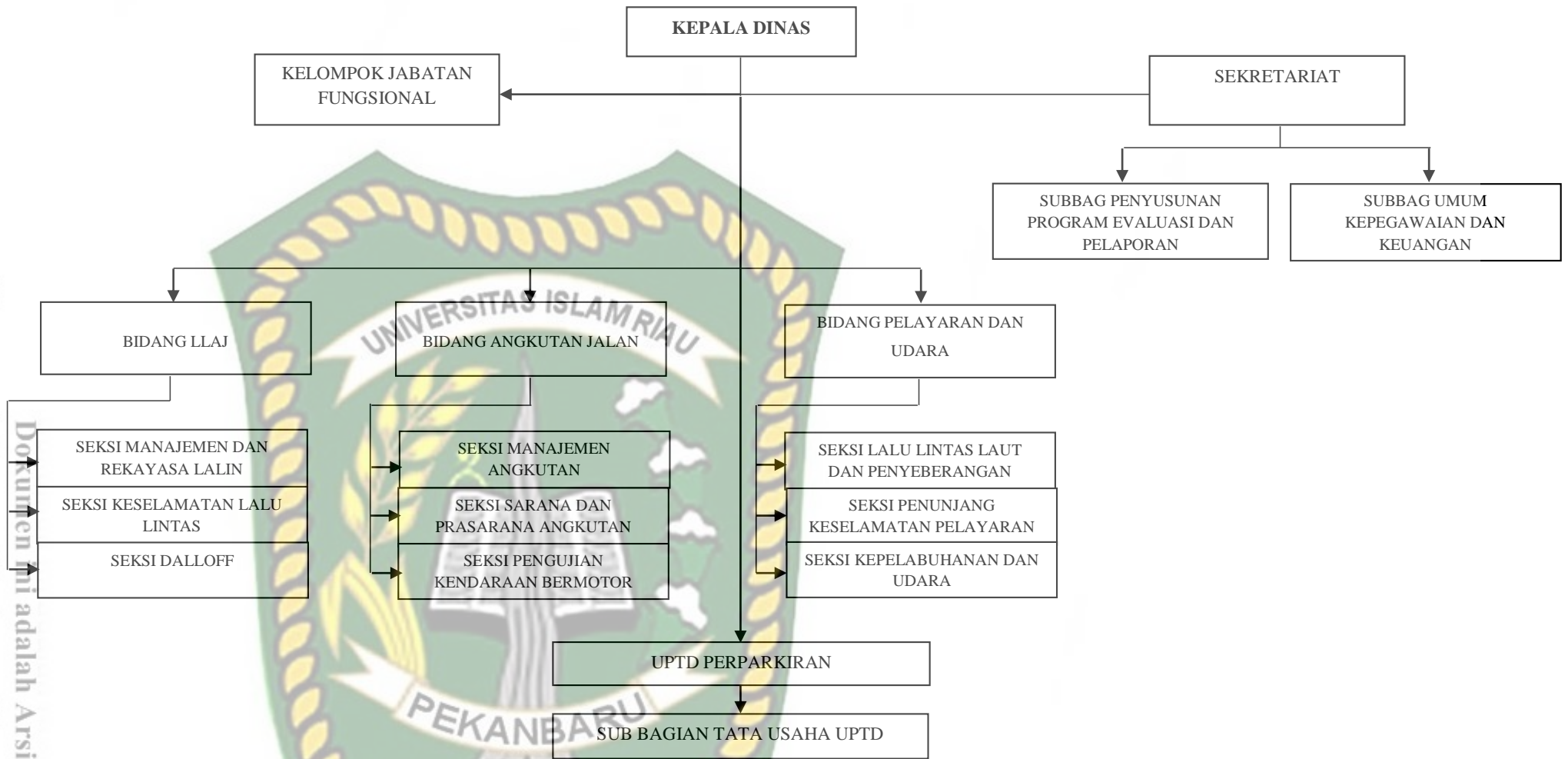
Struktur organisasi merupakan suatu rangkaian kerjasama yang menyeluruh dan menghubungkan fungsi-fungsi dari suatu organisasi serta memantapkan hubungan-

hubungan diantar petugas-petugas yang melaksanakan fungsinya masing-masing. Dengan dibentuknya struktur organisasi maka semua pihak akan mendapatkan gambaran tentang tugas dan tanggung jawab dalam suatu organisasi.

Oleh karena itu struktur organisasi sangat berguna untuk mengetahui besar kecilnya suatu organisasi, mengetahui jabatan-jabatan apa saja yang ada, mengetahui kedudukan masing-masing pejabat serta mengetahui tanggung jawab dan juga untuk menguji apakah suatu organisasi telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi dengan sebaik mungkin.



Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang



Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - a) Sub bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan
 - b) Sub bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan
- c. Bidang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan dan Jalan)
 - a) Seksi Manajemen dan Rekaya Lalin
 - b) Seksi Keselamatan Lalu Lintas
 - c) Seksi Daloff
- d. Kepala Bidang Angkutan Jalan
 - a) Seksi Manajemen Angkutan
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan
 - c) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
- e. Bidang Pelayaran dan Udara
 - a) Seksi Lalu Lintas Laut dan Penyeberangan
 - b) Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran
 - c) Seksi Kepelabuhanan dan Udara
- f. UPTD Perparkiran
- g. Sub bagian Tata Usaha UPTD

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara.

- b. Memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina serta mengelola seluruh kegiatan teknis administrasi dan kesekretariatan secara umum di lingkungan Dinas Perhubungan.
- c. Menyiapkan, menyusun dan merencanakan serta menyampaikan gagasan/usulan program pembangunan, anggaran belanja rutin. Pembangunan dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas Dinas.
- d. Menjalin kerjasama/mengkoordinasikan dengan instansi yang berhubungan dengan tugas dinas, dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas dinas, dan
- f. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengoordinasian, seluruh fungsi dinas, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Gambar IV.2 : Struktur Organisasi Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang.



Sumber: Seksi PKB Kota Tanjungpinang 2022

Seksi Pengujian kendaraan bermotor mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
- b) Penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan seksi pengujian kendaraan bermotor.
- c) Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan teknis pembinaan dan pengawasan pengoperasian kendaraan wajib uji pelayanan kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor, kelaikan kendaraan bermotor, meliputi persyaratan dan standarisasi konstruksi kendaraan dan penetapan pengujian pertama kendaraan bermotor.
- d) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data pembinaan dan pengawasan pengoperasian kendaraan wajib uji pelayanan kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor, kelaikan kendaraan bermotor meliputi persyaratan dan standarisasi konstruksi kendaraan dan penetapan pengujian pertama kendaraan bermotor.
- e) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengoperasian kendaraan wajib uji pelayanan kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor, kelaikan kendaraan bermotor meliputi persyaratan dan standarisasi konstruksi kendaraan dan penetapan pengujian pertama kendaraan bermotor.
- f) Pelaksanaan penyiapan pelayanan standar batas maksimum berat kendaraan angkutan barang.
- g) Pelaksanaan penyiapan dan survey batas maksimum berat kendaraan angkutan barang.
- h) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang, barang dan angkutan khusus dalam kota.
- i) Pelaksanaan penyiapan pengujian kendaraan bermotor secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kota, dan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang.

Sarana dan prasarana merupakan unsur yang penting demi menunjang keberhasilan pada suatu kegiatan dalam aktivitas organisasi, secara umum sarana dan prasarana merujuk pada seperangkat hal yang digunakan untuk melaksanakan proses kegiatan sehingga tujuan dari kegiatan tersebut bisa tercapai. Selain terdiri dari pegawai atau petugas yang bekerja juga telah dilengkapi sarana dan peralatan sebagai penunjang terhadap pelaksanaan tugas maupun fungsi yang mendukung pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada Seksi PKB. Sarana yang tersedia pada pengujian kendaraan bermotor kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV. 1 Sarana dan Prasarana pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Tanjungpinang.

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)	Keterangan	Kondisi
1	Kantor dan ruang kerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Kepala Seksi dan Pegawai Seksi PKB - Ruang arsip - Komputer - Loker 1, 2, dan 3 - Gudang - Gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor - Tempat parkir - Dan Ruang tunggu 	Cukup Baik
2	Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	9	<ul style="list-style-type: none"> - Alat uji emisi gas Buang - Alat uji ketebalan asap gas buang - Alat uji Suara Klakson dan knalpot - Alat uji Rem - Alat uji Lampu - Alat uji kincup roda depan - Alat uji pengukur 	Baik

			kedalaman alur ban - Alat uji daya tembus Cahaya pada kaca - Alat uji pengukur berat - DII	
--	--	--	--	--

Sumber : Seksi PKB Kota Tanjungpinang 2022

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat sarana dan prasarana kantor seksi pengujian kendaraan bermotor dan ruang kerja terdiri dari : ruang kepala seksi PKB, ruang arsip, komputer, loket 1,2,dan 3, gudang, gedung balai pengujian kendaraan bermotor, tempat parkir, dan ruang tunggu dalam kondisi cukup baik Sedangkan pada alat pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari : Alat uji emisi gas buang, Alat uji ketebalan asap gas buang, Alat uji suara kebisingan klakson dan knalpot, Alat uji rem, Alat uji lampu, Alat uji kincup roda depan, Alat uji pengukur kedalaman alur ban, Alat uji daya tembus cahaya pada kaca, dan alat uji pengukur berat, dari 9 alat uji tersebut dalam kondisi baik.

F. Bagan Alur Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang

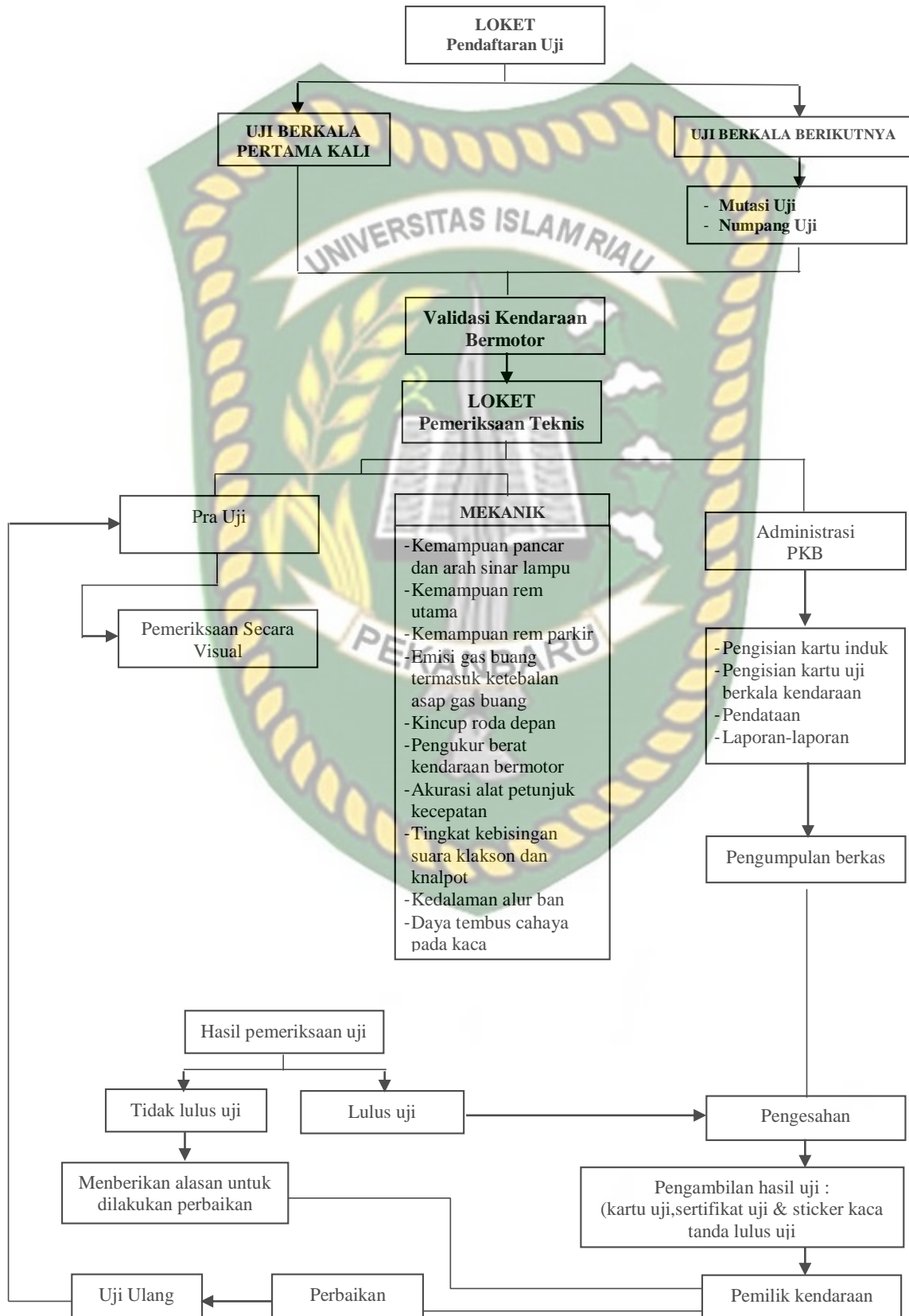
Pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan setiap 6 bulan sekali, yang dilaksanakan digedung/balai pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan alamat pada lokasi uji kendaraan.

1. Ketentuan dan syarat yang harus dilengkapi pada pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor :
 - a. Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB)/faktur asli atau fotokopi
 - b. Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) asli atau fotokopi
 - c. KTP asli atau fotokopi dan/atau surat kuasa dari pemilik

- d. Surat uji tipe (SUT) fotokopi
 - e. Sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) asli
 - f. Surat keputusan rancang bangun kendaraan bermotor (SKRB) fotokopi
 - g. Surat penentuan sifat kendaraan (SPSK) asli atau fotokopi
 - h. Surat keterangan tera untuk kendaraan tangki, dan
 - i. Tanda lunas retibusi uji kendaraan bermotor.
2. Bagan Alur Pelayanan Pengujian
- Bagan Alur Pelayanan pengujian kendaraan bermtor pada Seksi pengujian kendaraan bermotor Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar IV.3 : Bagan Alur Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas Responden merupakan keterangan yang diperoleh dari responden berupa data kuisisioner yang disebarkan oleh peneliti yang bersisian tentang nama, umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan responden dari pegawai seksi pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Sedangkan untuk pemilik kendaraan mobil barang wajib uji berisikan nama, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka bisa dilihat pada penjelasan dibawah ini.

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden pegawai seksi pengujian kendaraan bermotor terdiri dari satu jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin tentu mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan dalam bekerja, untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden yang ada pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dan supir atau pemilik kendaraan mobil barang dapat dilihat pada tabel V.1 dan V.2 sebagai berikut :

Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Responden Pegawai Menurut Jenis Kelamin Pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	10	100 %
2	Perempuan	-	-
	Jumlah	10	100%

Sumber : Data Penelitian, 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah pengurus pada pegawai Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang jika dilihat dari jenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 10 responden dengan persentase 100% dan untuk jenis kelamin perempuan tidak ada.

Kemudian untuk mengetahui distribusi jumlah responden menurut jenis kelamin Pada supir atau pemilik kendaraan di Kota Tanjungpinang yang berjumlah 60 responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2 : Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Pada Supir atau Pemilik Kendaraan Bermotor Di Kota Tanjungpinang

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	60	100%
2	Perempuan	-	-
	Jumlah	60	100%

Sumber : Data Penelitian, 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa untuk jumlah supir atau pemilik kendaraan bermotor mobil barang Di Kota Tanjungpinang pada laki-laki berjumlah 60 responden dengan persentase jumlah 100% dan perempuan berjumlah tidak ada dengan jumlah keseluruhan sebanyak 60 orang, jadi dapat dilihat untuk jumlah kendaraan bermotor mobil barang Kota Tanjungpinang bahwa laki-laki lebih dominan, dan peneliti tidak menemukan adanya supir perempuan.

2. Umur Responden

Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa yang tidak dan apa yang harus dilakukan, seperti diketahui

berdasarkan pegawai yang lebih tua umurnya akan lebih bijaksana dalam mengambil suatu tindakan dibandingkan pegawai yang lebih muda. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa pegawai yang lebih tua aktivitas fisiknya lebih kurang cepat dibandingkan pegawai yang lebih muda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3 : Distribusi Jumlah Responden Pegawai Menurut Umur (Usia) Pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang.

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	15-30	1	10%
2	31-40	6	60%
3	41-50	3	30%
4	>50	-	-
	Jumlah	10	100%

Sumber : Data Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 9 orang , dapat diketahui responden yang berusia 15-30 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 10%, usia 31-40 tahun berjumlah 6 orang dengan persentase 60%, usia 41-50 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 30%, dan usia >50 tahun tidak ada dari jumlah responden keseluruhan. Maka dari tabel diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa responden yang terbanyak adalah yang berusia 31-40 tahun.

Selanjutnya untuk mengetahui distribusi jumlah responden supir atau pemilik kendaraan menurut umur di Kota Tanjungpinang yang berjumlah 60 orang responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.4 : Distribusi Jumlah Responden Supir atau Pemilik Kendaraan Menurut Umur Pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil Barang Kota Tanjungpinang.

No	Usia	Jumlah	Persentase (100%)
1	15-30	16	26,67%
2	31-40	27	45%
3	41-50	12	20%
4	>50	5	8,33%
	Jumlah	60	100%

Sumber : *Data Penelitian, 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden pada supir atau pemilik kendaraan berjumlah 60 responden. Untuk responden yang berusia 15-30 tahun berjumlah 16 responden atau 26,67%, usia 31-40 tahun berjumlah 27 responden atau 45%, usia 41-50 tahun berjumlah 12 responden atau 20%, dan usia 50 tahun keatas berjumlah 5 orang atau 8,33%. Jadi dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa responden terbanyak ialah pada usia 31-40 tahun.

3. Pendidikan

Pendidikan salah satu faktor tolak ukur seseorang berperilaku pada kehidupan sehari-hari, pendidikan yang baik akan dapat menjadi cerminan tingkah laku seseorang. Dalam konteks kehidupan sosial pendidikan menjadi peran penting bagi mereka dalam berperilaku pada organisasi. Pendidikan juga dapat menjadi sebagai acuan dalam melihat kemampuan seseorang dalam melakukan sebuah pekerjaan yang dibebankan oleh pimpinan kepada bawahannya. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan suatu pondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin.

Secara umum pendidikan ialah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya.

Untuk mengetahui hasil penelitian penulis pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang mengenai tingkat pendidikan, maka bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.5 : Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Pegawai Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Tanjungpinang.

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	2	20%
4	Diploma	1	10%
5	Strata 1	7	70%
6	Strata 2	-	-
	Jumlah	10	100%

Sumber : Data Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa untuk identitas responden jika di lihat pada tingkatan pendidikan SMA sebanyak 2 responden atau 20%, tingkatan pendidikan Diploma sebanyak 1 responden atau 10%, dan untuk Strata 1 yaitu sebanyak 7 responden atau 70%. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari tingkat pendidikan responden yang terbanyak dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan Strata 1.

Kemudian untuk mengetahui distribusi jumlah responden supir atau pemilik kendaraan menurut tingkat pendidikan di kota Tanjungpinang yang berjumlah 60 responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.6 : Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Supir atau Pemilik Kendraan Pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil Barang Kota Tanjungpinang.

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	9	18%
2	SMP	19	32%
3	SMA	28	47%
4	Diploma	-	-
5	Strata 1	4	3%
6	Strata 2	-	-
	Jumlah	60	100%

Sumber : Data Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat peneliti simpulkan bahwa tingkat pendidikan pada responden penelitian ini didominasi oleh tamatan SMA yaitu berjumlah 28 responden atau 47%. Sedangkan jumlah responden terkecil berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu pada pendidikan Strata 1 (S1) berjumlah 2 responden atau 3%. Jadi bisa dilihat bahwa rata-rata tingkat pendidikan terbanyak ialah pada tamatan SMA.

B. Hasil dan Pembahasan

Pada sub bab hasil dan pembahasan ini akan dilakukan pemaparan hasil penelitian dan akan dilakukan juga pembahasan melalui hasil sebaran kuisioner peneliti yang telah disebarakan kepada Pegawai Dinas Perhubungan Seksi PKB dan Supir atau pemilik kendaraan bermotor mobil barang sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan ukuran dan tujuan dari suatu kebijakan atau program pada jangka tertentu, untuk mengukur kinerja pada implementasi kebijakan atau program harus menegaskan pada standar dan sasaran yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya

merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Untuk indikator standar dan sasaran kebijakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.7 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Standar dan Sasaran Kebijakan Untuk Pegawai

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
	2	3	4	5	6
1	Standar pengujian kendaraan bermotor	7 (78%)	2 (22%)	-	9
2	Sasaran pengujian kendaraan bermotor	1 (11%)	8 (89%)	-	9
	Jumlah	8	10	-	18
	Rata-rata	4	5	-	9
	Persentase	44%	56%	-	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan dari tabel V.7 diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap indikator Standar dan Sasaran Kebijakan untuk pegawai seksi pengujian kendaraan bermotor berada pada kategori "Cukup Terlaksana"

Pada standar pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan jawaban dari responden pegawai menjawab Terlaksana, hal ini dikarenakan pegawai merasakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan sudah sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.

Kemudian item penilaian sasaran pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan jawaban dari responden pegawai menjawab Cukup Terlaksana. Hal ini dikarenakan pegawai merasakan untuk sasaran pengujian kendaraan bermotor masih belum maksimal.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak Alfizar S.Sos selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Mengenai indikator Standar dan Sasaran Kebijakan, Berikut penjelasannya :

“Untuk standar pengujian kendaraan bermotor sudah tercapai karena pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kota Tanjungpinang sudah memenuhi standar yang telah ditentukan oleh kementerian perhubungan, dan untuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini juga telah terakreditasi sehingga pengujian kendaraan bermotor bisa dilaksanakan. Dan untuk sasaran pengujian kendaraan pada tahun 2020 mengalami penurunan, dikarenakan pada pertengahan tahun 2019 hingga awal tahun 2020 pelaksanaan pengujian kendaraan di kota tanjungpinang tidak melakukan pengujian dimana adanya kebijakan terbaru dari kementerian perhubungan bahwa setiap unit/seksi pengujian kendaraan bermotor harus memiliki alat uji terlebih dahulu jika tidak punya alat uji sesuai ketentuan kementerian perhubungan maka tidak boleh melakukan pengujian, sehingga saat diadakan alat uji pada awal januari 2020 pada seksi PKB kota Tanjungpinang banyak masyarakat sebagai pemilik kendaraan yang belum mengetahui bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan di kota Tanjungpinang telah berjalan kembali.”(Wawancara, Jum’at 24 September 2021, Pukul 10.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa standar pada pengujian kendaraan bermotor di dinas perhubungan kota Tanjungpinang sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, sedangkan pada sasaran pengujian kendaraan bermotor ini masih belum optimal karena adanya beberapa faktor dan kendala dalam dalam mencapai sasaran pengujian kendaraan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan pada indikator Standar dan Sasaran Kebijakan berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini terlihat bahwa masih banyak kendaraan mobil barang yang tidak melaksanakan wajib uji pada kendaraanya sehingga sasaran pada pengujian kendaraan bermotor belum terlaksana

dengan maksimal, sehingga masih banyak ditemukan kendaraan mobil barang yang tidak melaksanakan wajib uji kendaraan serta masih adanya ditemukan kendaraan-kendaraan mobil barang yang sudah tua maupun sudah tidak layak jalan dan kendaraan yang emisi gas buangnya berlebihan tentu dari segi keselamatan akan bisa menimbulkan berbagai permasalahan seperti kecelakaan lalu lintas serta pencemaran lingkungan.

Berdasarkan hasil kuisioner, wawancara, dan observasi yang telah penulis kumpulkan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa untuk indikator standar dan sasaran kebijakan berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. hal ini dikarenakan sasaran pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh seksi PKB dinas perhubungan kota Tanjungpinang masih belum berjalan dengan maksimal, dilihat dari jumlah yang mengujikan kendaraan untuk 2 tahun terakhir pada mobil barang mengalami penurunan drastis hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada kota Tanjungpinang masih belum berjalan dengan maksimal.

Tabel V.8 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Standar dan Sasaran Kebijakan Untuk Masyarakat sebagai Supir atau Pemilik Kendaraan

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Standar kebijakan/aturan pengujian kendaraan bermotor	41 (68%)	19 (32%)	-	60
2	Sasaran pengujian kendaraan bermotor	3 (5%)	41 (68%)	16 (27%)	60
Jumlah		44	60	16	120
Rata-rata		22	30	8	60
Persentase		37%	50%	13%	100%

Sumber : Data Olahan peneliti, 2022

Berdasarkan dari tabel V.8 diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap indikator Standar dan Sasaran Kebijakan untuk masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan berada pada kategori “Cukup Terlaksana”

Pada item penilaian standar pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan jawaban dari responden masyarakat sebagai pemilik kendaraan mereka menjawab Terlaksana, hal ini dikarenakan masyarakat sebagai pemilik kendaraan merasa bahwa kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan sudah memenuhi standar pengujian kendaraan yang berlaku.

Pada item penilaian sasaran pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan jawaban responden masyarakat sebagai pemilik kendaraan mereka menjawab Cukup Terlaksana. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa dinas perhubungan kota Tanjungpinang masih belum maksimal dalam bekerja sehingga masih banyak ditemukan kendaraan yang belum melaksanakan wajib uji pada kendaraannya masih bebas beroperasi di jalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama salah satu supir/pemilik kendaraan mobil barang pada kota Tanjungpinang. Mengenai indikator standar dan sasaran kebijakan, berikut penjelasannya :

“Jika dilihat dari standar pelaksanaan PKB yang ada pada Kota Tanjungpinang sejauh ini telah memenuhi standar untuk melaksanakan pengujian, karena saya merasakan untuk pengujian kendaran yang dilakukan untuk 2 tahun terakhir ini sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan uji kendaraan yang ada pada kota Tanjungpinang sudah lebih canggih dimana sudah menggunakan alat uji yang terhubung dengan komputer sehingga proses pengujian kendaraannya lebih baik dan akurat, sedangkan untuk sasaran pengujian kendaraan saya rasa masih belum maksimal, karena saya lihat kendaran yang ada di kota

Tanjungpinang ini masih banyak yang tidak melaksanakan uji kendaraannya".
(Wawancara, Selasa 28 September 2021, Pukul 16.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama masyarakat sebagai pemilik kendaraan mobil barang diatas bahwa sasaran pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan dinas perhubungan kota Tanjungpinang belum berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan masyarakat menilai bahwa masih banyak ditemukan kendaraan wajib uji yang belum melaksanakan uji kendaraannya.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator standar dan sasaran kebijakan berada pada kategori "Cukup Terlaksana". Hal ini dikarenakan bahwa sasaran keberhasilan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di lihat dari jumlah uji kendaraan, sedangkan dari data jumlah uji kendaraan yang diperoleh menunjukkan bahwa mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena belum maksimalnya kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam meyakinkan dan memberikan pemahaman dengan tepat sasaran pada supir atau pemilik kendaraan mobil brang dengan jelas tentang adanya perubahan sistem pada pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang sebelumnya masih dilakukan secara manual dan sekarang telah menggunakan alat uji, sehingga masih banyak masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan yang belum melaksanakan uji kendaraannya.

Berdasarkan hasil kuisisioner, wawancara, dan observasi yang telah dikumpulkan diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk indikator standar dan sasaran kebijakan berada pada kategori "Cukup Terlaksana". hal ini dikarenakan masih belum maksimalnya sasaran dalam pengujian kendaraan yang dilakukan dinas perhubungan kota Tanjungpinang dalam meyakinkan dan memberikan pemahaman kepada

masyarakat sebagai pemilik kendaraan tentang adanya perubahan kebijakan pada pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

2. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan unsur pelaksana yang memiliki peranan yang sangat penting bagi implementasi kebijakan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Dalam tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menentukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik,

Selain di luar sumberdaya manusia, sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan ialah sumberdaya finansial, dan sumberdaya waktu. Karena, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan untuk mrealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula dengan sumberdaya waktu, saat sumberdaya manusia giat bekerja dan anggaran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur oleh persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Setelah dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden maka untuk hasil pada indicator sumberdaya dapat dilihat melalui pada tabel dibawah berikut:

Tabel V.9 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Sumber Daya Untuk Pegawai Seksi PKB Kota Tanjungpinang

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah pegawai / petugas PKB	1 (11%)	8 (89%)	-	9
2	Biaya administrasi pengujian	8 (89%)	1 (11%)	-	9
3	Sarana alat uji dan alat pendukung PKB	7 (78%)	2 (22%)	-	9
Jumlah		16	11	-	27
Rata-rata		5	4	-	9
Persentase		56%	44%	-	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan dari tabel V.9 diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap indikator Sumber Daya untuk pegawai berada pada kategori "Terlaksana"

Pada item penilaian jumlah pegawai. Berdasarkan jawaban dari responden pegawai menjawab Cukup Terlaksana, hal ini dikarenakan pegawai merasakan dengan jumlah pegawai serta volume kendaraan yang ada saat ini masih bisa untuk menangani kendaraan yang ingin melakukan pengujian.

Pada item penilaian Biaya Administrasi Pengujian. Berdasarkan jawaban dari responden pegawai menjawab Terlaksana. Dikarenakan pegawai merasakan biaya pengujian kendaraan tidak memberatkan masyarakat dan masyarakat pun tidak merasa keberatan.

Kemudian pada item penilaian sarana alat uji dan alat pendukung PKB. Berdasarkan jawaban dari responden pegawai menjawab Terlaksana. Dikarenakan

pegawai merasakan alat uji yang dimiliki sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh kementerian perhubungan untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak Alfizar S.Sos selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang. Mengenai indikator Sumber Daya, berikut penjelasannya :

“Untuk SDM pada seksi pengujian kendaraan bermotor ini sebetulnya kami kekurangan tenaga untuk membuat sistem pelaporan yaitu pada tenaga administrasinya. Walaupun dirasa kurang, tetapi untuk pelaksanaannya masih bisa dimaksimalkan dengan tenaga yang ada, kemudian untuk biaya administrasi pelaksanaan PKB juga telah diatur pada perda kota Tanjungpinang no 2 tahun 2021 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor dan untuk itu dirasakan tidak memberatkan masyarakat sebagai pemilik kendaraan karena sejauh ini belum ada komplain serta keluhan dari masyarakat sebagai pemilik kendaraan terkait biaya pengujian. Kemudian untuk peralatan uji kendaraan kami sudah cukup memadai karena alat-alat yang digunakan sudah menggunakan sistem yang terhubung dengan komputerisasi dan untuk alat uji ini juga kami sudah memiliki alat uji yang baru sehingga dengan adanya alat uji ini kami juga membutuhkan anggaran untuk biaya pemeliharaan serta perawatan agar alat uji yang digunakan bisa lebih optimal kedepannya.”. (Wawancara, Jum’at 24 September 2021, Pukul 10.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sumber daya yang ada untuk saat ini sudah cukup baik untuk melaksanakan pengujian kendaraan dengan volume jumlah kendaraan yang ada saat ini, serta biaya administrasi pengujian, dan sarana alat uji maupun alat pendukung yang cukup memadai.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan pada indikator Sumber Daya berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. hal ini dilihat dari sumber daya manusia yang menjalankan pengujian kendaraan bermotor pada dinas perhubungan kota Tanjungpinang dinilai sudah cukup memenuhi untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, kemudian untuk biaya administrasi pengujian juga dirasa tidak

memberatkan masyarakat sebagai pemilik kendaraan untuk melaksanakan uji kendaraannya, kemudian untuk sarana alat uji dan alat pendukung yang ada pada seksi pengujian kendaraan bermotor kota Tanjungpinang sudah cukup memadai dan memenuhi syarat ketentuan untuk melaksanakan uji kendaraan bermotor. Dan untuk alokasi anggaran yang diberikan untuk 2 tahun terakhir oleh pemerintah kota Tanjungpinang dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dinilai sudah memenuhi target dan realisasi pada tahun 2020 anggaran yang diberikan sebanyak Rp142.218.000 dan pada tahun 2021 sebanyak 33.440.000 dari anggaran tersebut merupakan anggaran yang digunakan untuk peningkatan program kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil kuisioner, wawancara, dan observasi yang telah penulis kumpulkan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa untuk indikator sumber daya berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan sumberdaya yang ada dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sudah cukup baik dan maksimal dalam menjalankan kebijakan pengujian kendaraan bermotor.

Tabel V.10 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Sumber Daya Untuk Supir atau Pemilik Kendaraan.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah pegawai PKB	13 (22%)	35 (58%)	12 (20%)	60
2	Biaya administrasi pengujian	54 (90%)	6 (10%)	-	60
3	Sarana dan alat pendukung pengujian	19 (32%)	41 (68%)	-	60
Jumlah		86	82	12	180
Rata-rata		29	27	4	60
Persentase		48%	45%	7%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan dari tabel V.10 diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap indikator Sumber Daya untuk masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan berada pada kategori "Terlaksana".

Pada item penilaian jumlah pegawai PKB. Berdasarkan jawaban dari responden masyarakat sebagai pemilik kendaraan mereka menjawab Cukup Terlaksana, hal ini dikarenakan mereka menilai jumlah pegawai yang ada sudah cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Pada item penilaian biaya administrasi pengujian. Berdasarkan jawaban dari responden masyarakat sebagai pemilik kendaraan mereka menjawab Terlaksana, hal ini dikarenakan mereka menilai biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan uji kendaraan tidak begitu memberatkan.

Kemudian pada item sarana dan alat pendukung pengujian. Berdasarkan jawaban dari responden masyarakat sebagai pemilik kendaraan mereka menjawab Cukup Terlaksana, hal ini dikarenakan alat uji dan sarana pendukung yang ada sudah cukup memadai dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama salah satu supir/pemilik kendaraan mobil barang pada kota Tanjungpinang. Mengenai indikator sumber daya, berikut penjelasannya :

“Dilihat dari SDM yang ada pada pengujian kendaraan kota Tanjungpinang saat ini saya rasa sudah cukup dimana saya merasa uji kendaraan yang dilakukan sudah cukup maksimal, hal ini juga dikarenakan pengujian kendaraan yang ada pada kota tanjungpinang sudah menggunakan alat uji yang terhubung dengan sistem komputer sehingga pelaksanaannya lebih cepat dan akurat dibandingkan pemeriksaan yang dilakukan secara manual, serta biaya pengujian kendaraan pun saya rasa juga sudah cukup dan tidak memberatkan menurut saya”.(Wawancara, Rabu 28 September 2021, Pukul 16.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama masyarakat sebagai supir/pemilik kendaraan mobil barang diatas bahwa sumber daya yang ada pada pengujian kendaraan bermotor pada kota Tanjungpinang sudah cukup terlaksana dikarenakan masyarakat sebagai pemilik kendaraan merasakan dinas perhubungan kota Tanjungpinang sudah melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dengan cukup baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator sumber daya berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan seksi pengujian kendaraan bermotor pada kota Tanjungpinang mampu menjalankan tugasnya dengan cukup baik berdasarkan SDM yang dimiliki dalam menguji kendaraan, serta pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan sudah

menggunakan alat uji yang tersistem dengan komputer sehingga pelaksanaannya lebih akurat dan tidak memakan waktu yang begitu lama.

Berdasarkan hasil kuisisioner, wawancara, dan observasi yang telah dikumpulkan diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk indikator sumber daya berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan menilai pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan sudah cukup baik seperti pengujian kendaraan yang sudah menggunakan alat uji sehingga proses pengujian lebih cepat dan akurat, serta dari segi SDM juga sudah cukup untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor pada dinas perhubungan kota Tanjungpinang.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi salah satu unsur yang direncanakan dalam melaksanakan kebijakan yang telah disusun dengan cara menyebarkan informasi. Komunikasi yang dimaksud peneliti ialah berupa sosialisasi serta penyebaran informasi lain yang berkaitan dengan program tersebut. Setelah dilakukan penyeberan kuisisioner kepada responden maka untuk hasil pada indicator komunikasi antar organisasi dapat dilihat melalui pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.11 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Komunikasi Antar Organisasi Untuk Pegawai Seksi PKB Kota Tanjungpinang

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat	6 (67%)	3 (33%)	-	9
2	Arahan lisan atau tulisan	9 (100%)	-	-	9
3	Pengetahuan supir atau pemilik kendaraan terhadap sanksi	8 (89%)	1 (11%)	-	9
Jumlah		23	4	-	27
Rata-rata		8	1	-	9
Persentase		89%	11%	-	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan dari tabel V.11 diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap indikator Komunikasi Antar Organisasi untuk pegawai berada pada kategori "Terlaksana"

Pada item penilaian sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Berdasarkan jawaban dari responden pegawai menjawab Terlaksana, hal ini dikarenakan pegawai merasakan sosialisasi sudah dilakukan secara langsung maupun tak langsung.

Pada item penilaian arahan lisan atau tulisan. Berdasarkan jawaban dari responden pegawai menjawab Terlaksana. Dikarenakan sudah dilakukan agar pemilik kendaraan paham apa yang harus dilengkapi dalam pengurusan kendaraan yang akan di uji.

Kemudian pada item penilaian sarana alat uji dan alat pendukung PKB. Berdasarkan jawaban dari responden pegawai menjawab Terlaksana. Dikarenakan pegawai merasakan sudah menjelaskan kepada masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan terkait sanksi apa saja yang diberikan jika tidak melaksanakan wajib uji kendaraan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak Alfizar S.Sos selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang. Mengenai indikator Sumber Daya, berikut penjelasannya :

“Terkait sosialisasi kepada masyarakat sebagai pemilik kendaraan itu sudah pernah dilakukan secara langsung maupun tak langsung, namun untuk saat ini sosialisasi kami lakukan melalui wartawan yang datang ke gedung uji atau kantor dinas Kota Tanjungpinang yang ingin memperoleh informasi terkait tentang pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor serta membagikan informasi terkait pelaksanaan PKB itu melalui media cetak seperti koran, kemudian kami juga memasang spanduk terkait aturan pelaksanaan PKB yang telah dipasang pada gedung pengujian dan dikantor dinas perhubungan kota Tanjungpinang. kemudian untuk arahan juga telah kami berikan kepada pemilik kendaraan saat pemlik kendaraan yang melakukan uji kendaraan.”(Wawancara, Jum’at 24 September 2021, Pukul 10.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa komunikasi yang dilakukan dinas perhubungan melalui seksi pengujian kendaraan sudah pernah dilakukan dan dirasa sudah maksimal.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan pada indikator komunikasi antar organisasi berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan adanya upaya yang telah dilakukan dinas perhubungan kota Tanjungpinng dalam memberikan sosialisasi serta arahan maupun pemahaman kepada supir atau pemilik

kendaraan mengenai ketentuan kebijakan/aturan apa saja yang harus dilengkapi pada pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil kuisioner, wawancara, dan observasi yang telah penulis kumpulkan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa untuk indikator komunikasi antar organisasi berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan bahwa dinas perhubungan kota Tanjungpinang melalui seksi pengujian kendaraan bermotor merasakan sudah melaksanakan sosialisasi, arahan maupun memberikan pemahaman secara jelas kepada masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan yang hendak melaksanakan uji kendaraannya.

Tabel V.12 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Komunikasi Antar Organisasi Untuk Supir atau Pemilik Kendaraan

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Sosialisasi pengujian kendaraan bermotor	12 (20%)	29 (48%)	19 (32%)	60
2	Arahan lisan atau tulisan	17 (28%)	31 (52%)	12 (20%)	60
3	Pengetahuan supir atau pemilik kendaraan terhadap sanksi	7 (12%)	42 (70%)	11 (18%)	60
Jumlah		36	102	42	180
Rata-rata		12	34	14	60
Persentase		20%	57%	23%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan dari tabel V.12 diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap indikator Komunikasi Antar Organisasi untuk masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan berada pada kategori “Cukup Terlaksana”

Pada item penilaian sosialisasi pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan jawaban dari responden masyarakat sebagai pemilik kendaraan mereka menjawab Cukup Terlaksana, hal ini dikarenakan masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan merasakan bahwa sosialisasi yang dilakukan dinas perhubungan kota Tanjungpinang sudah cukup baik.

Pada item penilaian arahan lisan atau tulisan. Berdasarkan jawaban responden masyarakat sebagai pemilik kendaraan mereka menjawab Cukup Terlaksana. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa pegawai telah memberikan arahan dengan baik sehingga supir atau pemilik kendaraan mudah memahaminya.

Kemudian pada item penilaian pengetahuan supir atau pemilik kendaraan terhadap sanksi. Berdasarkan jawaban responden masyarakat sebagai pemilik kendaraan mereka menjawab Cukup Terlaksana. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa cukup memahami sanksi yang diberikan apabila tidak melaksanakan uji kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama salah satu supir/pemilik kendaraan mobil barang pada kota Tanjungpinang. Mengenai indikator komunikasi antar organisasi, berikut penjelasannya :

“Mengenai sosialisasi yang dilakukan saya kurang begitu mengetahuinya dengan jelas, jadi untuk informasi yang saya peroleh tentang pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini ya saya cukup mendatangi tempat pengujian kendaraan bermotor karena disana sudah ada informasi syarat maupun ketentuan yang jelas untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Kemudian untuk arahan yang diberikan oleh dinas perhubungan kota Tanjungpinang saat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor saya rasa sudah cukup baik dan jelas, dan untuk mengenai sanksi sendiri saya sudah cukup memahami apa saja sanksi yang diberikan apabila tidak melaksanakan uji kendaraan”.(Wawancara, Rabu 28 September 2021, Pukul 16.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama masyarakat sebagai supir/pemilik kendaraan mobil barang diatas dapat dilihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan sudah cukup baik, kemudian untuk arahan yang diberikan dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor maupun sanksi yang diberikan apabila tidak melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sudah cukup jelas.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator komunikasi antar organisasi berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota Tanjungpinang kepada masyarakat sebagai pemilik kendaraan mobil barang sehingga adanya supir atau pemilik kendaraan mobil barang yang belum mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor pada Kota Tanjungpinang dikarenakan sosialisasi yang diberikan masih belum merata dan maksimal.

Berdasarkan hasil kuisisioner, wawancara, dan observasi yang telah dikumpulkan diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk indikator komunikasi antar organisasi berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan dinas perhubungan kota Tanjungpinang sehingga adanya supir atau pemilik kendaraan yang masih belum memahami dengan jelas mengenai ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana merupakan pusat perhatian yang meliputi organisasi formal dan informal yang terlibat pada pengimplementasian kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan akan sangat berpengaruh serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan yang dituntut akan kedisiplinan. Kemudian setelah dilakukan penyeberan kuisisioner kepada responden maka untuk hasil pada indikator karakteristik agen pelaksanan dapat dilihat melalui pada tabel dibawah berikut:

Tabel V.13 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Karakteristik Agen Pelaksana Untuk Pegawai Seksi PKB Kota Tanjungpinang

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Sikap dan tindakan pegawai pada pelayanan PKB	8 (89%)	1 (11%)	-	9
2	Bekerja sesuai dengan SOP	8 (89%)	1 (11%)	-	9
Jumlah		16	2	-	18
Rata-rata		8	1	-	9
Persentase		89%	11%	-	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan dari tabel V.13 diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap indikator Karakteristik Agen Pelaksana untuk pegawai berada pada kategori "Terlaksana"

Pada item penilaian sikap dan tindakan pegawai pada pelayanan PKB. Berdasarkan jawaban dari responden pegawai menjawab Terlaksana, hal ini dikarenakan pegawai merasakan sikap dan tindakan yang diberikan kepada pemilik kendaraan sudah terlaksana dengan baik.

Pada item penilaian bekerja sesuai dengan prosedur. Berdasarkan jawaban dari responden pegawai menjawab Terlaksana. Dikarenakan pegawai merasakan SOP yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak Alfizar S.Sos selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang. Mengenai indikator Karakteristik Agen Pelaksana, berikut penjelasannya :

“Pada Seksi PKB ini secara sikap dan tindakan yang diberikan kepada masyarakat sebagai pemilik kendaraan yang datang ingin menguji kendaraanya telah kami terapkan karena pengujian kendaraan ini dinilai sangat membantu dalam memberikan dampak positif bagi kendaraan guna memberikan keselamatan serta keamanan pada kendaraan saat di jalan. Kemudian untuk SOP kami juga sudah punya dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan”.(Wawancara, Jum’at 24 September 2021, Pukul 10.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa karakteristik agen pelaksana sangat berperan penting dalam melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor, dengan itu layanan pengujian kendaraan yang diberikan akan meningkatkan rasa kepedulian pemilik kendaraan terhadap pentingnya dalam melakukan uji kendaraan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan pada indikator karakteristik agen pelaksana berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan sikap dan tindakan pegawai serta SOP yang diberikan sudah baik dan sesuai dalam memberikan layanan pengujian kendaraan bermotor pada kota Tanjungpinang, hal ini dapat dilihat dari optimalnya informasi yang diberikan pada lokasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di kota Tanjungpinang, sehingga pemilik kendaraan mengetahui dengan jelas kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan uji kendaraan.

Berdasarkan hasil kuisioner, wawancara, dan observasi yang telah penulis kumpulkan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa untuk indikator karakteristik agen pelaksana berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan bahwa dinas perhubungan kota Tanjungpinang melalui seksi pengujian kendaraan bermotor sudah melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan dengan baik dan jelas kepada masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan.

Tabel V.14 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Karakteristik Agen Pelaksana Untuk Supir atau Pemilik Kendaraan Mobil Barang

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Sikap dan tindakan pegawai pada pelayanan PKB	14 (23%)	34 (57%)	12 (20%)	60
2	Bekerja sesuai dengan SOP	44 (73%)	16 (27%)	-	60
Jumlah		58	50	12	120
Rata-rata		29	25	6	60
Persentase		48%	42%	10%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan dari tabel V.14 diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap indikator Karakteristik Agen Pelaksana untuk masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan berada pada kategori “Terlaksana”

Pada item penilaian sikap dan tindakan pegawai pada pelayanan PKB. Berdasarkan jawaban dari responden masyarakat sebagai pemilik kendaraan mereka menjawab Cukup Terlaksana, hal ini dikarenakan masyarakat sebagai supir atau pemilik

kendaraan merasa sikap dan tindakan pegawai saat melakukan uji kendaraan sudah cukup baik.

Pada item penilaian bekerja sesuai dengan SOP. Berdasarkan jawaban responden masyarakat sebagai pemilik kendaraan mereka menjawab Terlaksana. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa pegawai telah melaksanakan SOP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama salah satu supir/pemilik kendaraan mobil barang pada kota Tanjungpinang. Mengenai indikator karakteristik agen pelaksana, berikut penjelasannya :

“Kalau menurut saya ya untuk pelayanan dari pegawai atau petugas penguji dalam melayani sudah cukup baik terutama dari sikap maupun tindakan yang diberikan saya rasa sudah cukup baik, kemudian untuk SOP yang digunakan juga sudah baik dan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada pada pengujian kendaraan kota Tanjungpinang, karena informasi yang tersedia pada tempat pengujian terkait tahapan-tahapan untuk melaksanakan uji kendaraan itu sudah cukup jelas”.(Wawancara, Rabu 28 September 2021, Pukul 16.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama masyarakat sebagai supir/pemilik kendaraan mobil barang diatas dapat dilihat bahwa pemilik kendaraan merasa sangat terbantu dengan adanya informasi yang jelas pada tempat pengujian kendaraan bermotor kota Tanjungpinang.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai karakteristik agen pelaksana berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan sikap dan tindakan pegawai maupun SOP yang dilakukan sudah sesuai dan sangat membantu masyarakat dalam menerima layanan pengujian kendaraan bermotor

salah satunya dengan diberlakukannya sistem pembayaran non tunai yang bisa mempermudah serta meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien, sehingga dengan adanya sistem pembayaran non tunai ini bertujuan untuk menghindari adanya petugas yang melakukan pemungutan biaya pengujian yang lebih tinggi atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam pemungutan retribusi dengan maksud agar pemilik kendaraan mudah diloloskan dalam menguji kendaraannya.

Berdasarkan hasil kuisisioner, wawancara, dan observasi yang telah dikumpulkan diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk indikator karakteristik agen pelaksana berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan masyarakat merasakan seksi pengujian kendaraan bermotor sudah bekerja dengan baik dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik yaitu lingkungan turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi kegagalan pada kinerja implementasi kebijakan. Indikator ini dimaksudkan ialah pengaruh suatu kebijakan terhadap lingkungan masyarakat, seperti dalam perekonomian, dan pengetahuan tentang politik atau pemerintahan. Setelah dilakukan penyeberan kuisisioner kepada responden maka untuk hasil pada indicator sumberdaya dapat dilihat melalui pada tabel dibawah berikut:

Tabel V.15 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik Untuk Pegawai Seksi PKB Kota Tanjungpinang

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Dampak positif pada pelaksanaan PKB	7 (78%)	2 (22%)	-	9
2	Dampak negatif dari kendaraan tidak layak jalan	5 (56%)	4 (44%)	-	9
Jumlah		12	6	-	27
Rata-rata		6	3	-	9
Persentase		67%	33%	-	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan dari tabel V.15 diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap indikator Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik untuk pegawai berada pada kategori "Terlaksana"

Pada item penilaian dampak positif pada pelaksanaan PKB. Berdasarkan jawaban dari responden pegawai menjawab Terlaksana, hal ini dikarenakan pegawai merasakan pengujian kendaraan ini sangat membantu dalam memeriksa kelaikan kendaraan dengan tujuan mengurangi kecelakaan lalu lintas serta mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan pada kondisi kendaraan.

Pada item penilaian dampak negatif dari kendaraan bermotor. Berdasarkan jawaban dari responden pegawai menjawab Terlaksana. Dikarenakan pegawai merasakan adanya upaya yang dilakukan dinas perhubungan kota Tanjungpinang dalam mengatasi kendaraan yang tidak melaksanakan wajib uji dan terhadap kendaraan tidak layak jalan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak Alfizar S.Sos selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang. Mengenai indikator kondisi lingkungan, sosial ekonomi, dan poliik. Berikut penjelasannya :

“Untuk dampak positif pada pelaksanaan PKB ini sudah sangat jelas yaitu untuk memberikan jaminan keselamatan serta mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pada kondisi kendaraan dan mampu mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan emisi gas buang pada kendaraan yang berlebihan sehingga kendaraan yang digunakan aman dan layak jalan. Kemudian dampak negatif yang disebabkan kendaraan tidak layak sejauh ini jika dilihat memang banyak ditemukan kendaraan yang beroperasi seperti kendaraan yang tua sudah tidak layak jalan dan kendaraan yang emisi gas buang tidak memenuhi ambang batas. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kondisi pada kendaran yang digunakan. (Wawancara, Jum’at 24 September 2021, Pukul 10.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dampak negatif dari kendaraan tidak layak yang dilakukan dinas perhubungan terhadap kendaraan masih belum maksimal.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan pada indikator kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan dampak negatif dari kendaraan tidak layak jalan yang masih banyak ditemukan beropersi dengan bebas sehingga bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan emisi kendaraan yang tidak memenuhi ambang batas.

Tabel V.16 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik Untuk Supir atau Pemilik Kendaraan

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Dampak positif pada pelaksanaan PKB	39 (65%)	21 (35%)	-	60
2	Dampak negatif dari kendaraan tidak layak jalan	11 (18%)	33 (55%)	16 (27%)	60
Jumlah		50	54	16	120
Rata-rata		25	27	8	60
Persentase		42%	45%	13%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan dari tabel V.16 diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap indikator Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik untuk masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan berada pada kategori “Cukup Terlaksana”

Pada item penilaian dampak positif pada pelaksanaan PKB. Berdasarkan jawaban dari responden masyarakat sebagai pemilik kendaraan mereka menjawab Terlaksana, hal ini dikarenakan masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan merasa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini sangat penting dilakukan dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas serta mengurangi pencemaran lingkungan.

Pada item penilaian dampak negatif dari kendaraan tidak layak. Berdasarkan jawaban responden masyarakat sebagai pemilik kendaraan mereka menjawab Cukup Terlaksana. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa bahwa masih ada ditemukan kendaraan yang tidak layak jalan yang masih bebas beroperasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama salah satu supir/pemilik kendaraan mobil barang pada kota Tanjungpinang. Mengenai indikator kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Berikut penjelasannya :

“Jika dilihat dari dampak positif pada pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini saya rasa sangat jelas yaitu untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas serta mengurangi pencemaran lingkungan dari kendaraan yang tidak layak jalan, kemudian mengenai dampak negatif yg disebabkan kendaraan tidak layak ya bisa menimbulkan kecelakaan serta menimbulkan pencemaran udara yang tidak sehat, sejauh ini saya lihat masih banyak sekali kendaraan yang tidak layak yang masih beroperasi dengan bebas karena kurangnya tindakan tegas yang dilakukan dinas perhubungan kota Tanjungpinang terhadap kendaraan tidak layak jalan”.(Wawancara, Rabu 28 September 2021, Pukul 16.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama masyarakat sebagai supir/pemilik kendaraan mobil barang diatas dapat dilihat bahwa masih banyaknya kendaraan yang tidak layak jalan yang masih beroperasi dengan bebas tanpa memperhatikan dampak yang dirasakan sehingga masyarakat sebagai pemilik kendaraan merasa bahwa belum maksimalnya kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam mengatasi dampak negatif yang disebabkan kendaraan tidak layak jalan.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik berada pada kategori “Kurang Terlaksana”. Hal ini dikarenakan masih adanya ditemukan kendaraan mobil barang yang tidak layak jalan yang masih beroperasi di Kota Tanjungpinang tanpa memperhatikan dampak keselamatan dalam berlalu lintas dan kesehatan yang diakibatkan emisi gas buang kendaraan yang berlebih. Sehingga perlu adanya upaya atau tindakan tegas yang harus dilakukan dinas perhubungan kota Tannungpinang dalam mengatasi kendaraan-kendaraan yang tidak layak jalan.

Berdasarkan hasil kuisioner, wawancara, dan observasi yang telah dikumpulkan diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk indikator kondisi lingkungan sosial ekonomi dan politik berada pada kategori “Kurang Terlaksana”. Hal ini dikarenakan .

6. Disposisi Implementor

Disposisi Implementor merupakan respon pelaksana yang meliputi sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan serta pemahaman dari pelaksana terhadap kebijakan. Hal ini sangat berpengaruh pada suatu keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaan kebijakan publik.

Tabel V.17 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Disposisi Implementor Untuk Pegawai Seksi PKB Kota Tanjungpinang

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Kinerja pegawai terhadap tugas dan fungsinya	8 (89%)	1 (11%)	-	9
2	Pemahaman pegawai terhadap kebijakan/aturan	8 (89%)	1 (11%)	-	9
Jumlah		16	2		27
Rata-rata		8	1	-	27
Persentase		89%	11%	-	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan dari tabel V.17 diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap indikator Disposisi Implementor untuk pegawai berada pada kategori “Terlaksana”

Pada item penilaian kinerja pegawai terhadap tugas dan fungsinya. Berdasarkan jawaban dari responden pegawai menjawab Terlaksana, hal ini dikarenakan pegawai

merasakan tugas dan fungsi yang dilakukan sudah berjalan dengan sesuai aturan serta tugas yang ditetapkan.

Pada item penilaian pemahaman pegawai terhadap kebijakan/aturan. Berdasarkan jawaban dari responden pegawai menjawab Terlaksana. hal ini dikarenakan pegawai merasakan telah memahami kebijakan/aturan dari pengujian kendaraan bermotor.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak Alfizar S.Sos selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang. Mengenai indikator Disposisi Implementor. Berikut penjelasannya :

“Sejauh ini kalau ditanya kinerja tugas dan fungsi maupun pemahaman pada pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang kami lakukan saya rasa sudah cukup, karena beberapa dari pegawai atau petugas sudah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan ketentuan dari kementerian perhubungan. ” (Wawancara, Jum’at 24 September 2021, Pukul 10.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kinerja pegawai terhadap tugas dan fungsinya, maupun pemahaman pegawai juga sudah terlaksana dengan baik, karena pegawai yang ada pada seksi pengujian kendaraan telah memenuhi kompetensi untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan pada indikator disposisi implementor berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan pegawai yang ada pada seksi pengujian kendaraan bermotor pada kota Tanjungpinang telah memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, sehingga pengujian kendaraan bermotor telah berjalan dengan maksimal.

Tabel V.18 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Disposisi Implementor Untuk Supir atau Pemilik Kendaraan

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Kinerja pegawai terhadap tugas dan fungsinya	14 (23%)	40 (67%)	6 (10%)	60
2	Pemahaman pegawai terhadap kebijakan/aturan	32 (53%)	28 (47%)	-	60
Jumlah		46	68	6	120
Rata-rata		23	34	3	60
Persentase		38%	57%	5%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan dari tabel V.18 diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap indikator Disposisi Implementor untuk masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan berada pada kategori "Cukup Terlaksana"

Pada item penilaian kinerja pegawai terhadap tugas dan fungsinya. Berdasarkan jawaban dari responden masyarakat sebagai pemilik kendaraan mereka menjawab Cukup Terlaksana, hal ini dikarenakan masyarakat menilai bahwa pegawai telah melaksanakan tugas dan fungsinya sudah cukup sesuai dengan arahan yang diberikan.

Pada item penilaian pemahaman pegawai terhadap kebijakan/aturan. Berdasarkan jawaban responden masyarakat sebagai pemilik kendaraan mereka menjawab Terlaksana. Hal ini dikarenakan masyarakat menilai bahwa pegawai sudah memahami dengan jelas tentang pengujian kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama salah satu supir/pemilik kendaraan mobil barang pada kota Tanjungpinang. Mengenai indikator Disposisi Implementor. Berikut penjelasannya :

“Kalau dilihat dari kinerja pegawai terhadap tugas dan fungsinya maupun pemahaman pegawai dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor saya rasa pegawai telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan karena yang saya tau mengenai pengujian kendaraan ini setiap pegawai pasti sudah memiliki kompetensi yang cukup dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor”.(Wawancara, Rabu 28 September 2021, Pukul 16.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama masyarakat sebagai supir/pemilik kendaraan mobil barang diatas dapat dilihat bahwa masyarakat merasa cukup puas akan kinerja maupun pemahaman pegawai dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator disposisi implementor berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan setiap pegawai atau petugas penguji sudah memiliki kompetensi yang cukup dalam menjalankan kebijakan atau aturan pada pengujian kendaraan bermotor sehingga pelaksanaannya sudah berjalan dengan cukup baik.

Berdasarkan hasil kuisisioner, wawancara, dan observasi yang telah dikumpulkan diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk indikator disposisi implementor berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan pengujian kendaraan bermotor pada kota Tanjungpinang untuk pegawai/petugas yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan/aturan sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga pengujian kendaraan bermotor pada kota Tanjungpinang berjalan dengan cukup maksimal.

C. Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang)

Kemudian setelah melakukan pembahasan pada masing-masing indikator maka dari hasil penelitian secara keseluruhan perlu dilakukan rekapitulasi seluruh Jawaban responden terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang).

Rekapitulasi ini dapat membantu peneliti dalam menilai keseluruhan indikator, yang terdiri dari 6 indikator yaitu : Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Disposisi Implementor.

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel V.19 : Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) Untuk Pegawai.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
	2	3	4	5	6
1	Standar dan Sasaran Kebijakan	4 (44%)	5 (56%)	-	9
2	Sumber Daya	5 (56%)	4 (44%)	-	9
3	Komunikasi Antar Organisasi	8 (89%)	1 (11%)	-	9
4	Karakteristik Agen Pelaksana	8 (89%)	1 (11%)	-	9
5	Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	6 (67%)	3 (33%)	-	9
6	Disposisi Implementor	8 (89%)	1 (11%)	-	9
Jumlah		39	15	-	54
Rata-rata		6,5	2,5	-	9
Persentase		72%	28%	-	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022.

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi jawaban responden pegawai yang penulis dapatkan. Untuk indikator Standar dan Sasaran Kebijakan berada pada kategori Cukup Terlaksana. Hal ini dikarenakan mereka menilai belum maksimalnya sasaran pada pengujian kendaraan yang dilakukan karena kurangnya kesadaran masyarakat.

Pada indikator Sumber Daya berada pada kategori Cukup Terlaksana. hal ini dikarenakan sumber daya anggaran untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang masih belum maksimal, sehingga ada program/kegiatan yang masih belum maksimal.

Pada indikator Komunikasi Antar Organisasi berada pada kategori Terlaksana. Hal ini dikarenakan pegawai menilai sosialisasi yang diberikan oleh dinas perhubungan melalui seksi PKB dirasa sudah maksimal. Kemudian, pemahaman yang diberikan kepada pemilik kendaraan saat melakukan uji kendaraan dinilai sudah sesuai dan jelas.

Pada indikator Karakteristik Agen Pelaksana berada pada kategori Terlaksana. Hal ini dikarenakan pertama, mereka menilai sikap dan tindakan yang mereka berikan kepada pemilik kendaraan sudah terlaksana dengan baik. Kemudian SOP yang digunakan juga sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pada indikator Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik berada pada kategori Kurang Terlaksana. Hal ini dikarenakan pengawasan pada kendaraan yang kurang optimal sehingga banyak ditemukan kendaraan yang tidak layak jalan dan kendaraan yang tidak melaksanakan wajib uji bebas beroperasi di jalan.

Kemudian pada indikator Disposisi Implementor berada pada kategori Terlaksana. Hal ini dikarenakan pegawai menilai sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Maka mereka menilai disposisi implementor sudah memenuhi syarat dan ketentuan atau sudah terlaksana untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

Tabel V.20 : Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) Untuk Supir atau Pemilik Kendaraan.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Standar dan Sasaran Kebijakan	22 (37%)	30 (50%)	8 (13%)	60
2	Sumber Daya	29 (48%)	27 (45%)	4 (7%)	60
3	Komunikasi Antar Organisasi	12 (20%)	34 (57%)	14 (40%)	60
4	Karakteristik Agen Pelaksana	29 (48%)	25 (42%)	6 (10%)	60
5	Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	25 (42%)	27 (45%)	8 (13%)	60
6	Disposisi Implementor	23 (38%)	34 (57%)	3 (5%)	60
Jumlah		140	177	43	360
Rata-rata		23	30	7	60
Persentase		38%	50%	12%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi jawaban responden masyarakat yang penulis dapatkan. Untuk indikator Standar dan Sasaran Kebijakan berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan masyarakat merasakan bahwa pegawai seksi PKB belum maksimal dalam memperhatikan kendaraan wajib uji maupun kendaraan yang tidak layak sehingga sasaran terhadap kendaraan khususnya pada mobil barang masih belum tercapai.

Pada indikator Sumber Daya berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan masyarakat merasakan pegawai dinas perhubungan melalui seksi pengujian kendaraan bermotor kota Tanjungpinang sudah cukup memenuhi syarat untuk

melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dari segi jumlah SDM, biaya pengujian, dan sumber daya peralatan uji yang ada.

Pada indikator Komunikasi Antar Organisasi berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan masyarakat merasakan komunikasi yang dilakukan dinas perhubungan kota Tanjungpinang dalam memberikan sosialisasi masih belum maksimal.

Pada indikator Karakteristik Agen Pelaksana berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan masyarakat merasakan bahwa seksi pengujian kendaraan bermotor dalam memberikan pelayanan pada pengujian kendaraan sudah berjalan dengan baik.

Pada indikator Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik berada pada kategori “Kurang Terlaksana”. Hal ini dikarenakan masyarakat merasakan bahwa masih belum maksimalnya dinas perhubungan kota Tanjungpinang dalam mengupayakan atau mengatasi dampak negatif terhadap kendaraan yang tidak melaksanakan wajib uji serta pada kendaraan yang tidak layak jalan.

Kemudian pada indikator Disposisi Implementor berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan masyarakat merasakan bahwa pegawai yang ada pada seksi pengujian kendaraan bermotor pada kota Tanjungpinang sudah cukup memenuhi kompetensi dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

D. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) ditemukan beberapa hambatan, antara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan mobil barang dalam memperhatikan kondisi pada kendaraannya dan kurangnya kesadaran untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Sosialisasi yang diberikan dinas perhubungan kota Tanjungpinang dalam memberikan pemahaman kepada pemilik kendaraan masih belum maksimal, dikarenakan adanya supir atau pemilik kendaraan mobil barang yang belum memahami dengan jelas mengenai pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
3. Sasaran dalam pengujian kendaraan bermotor pada mobil barang belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya supir atau pemilik kendaraan yang belum melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sehingga menurunnya jumlah uji kendaraan.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti yang telah pemeliti atau penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang). Dengan itu penulis menarik kesimpulan dan saran-saran untuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang terkhusus pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang yaitu sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pada Indikator Standar dan Sasaran Kebijakan tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang, berdasarkan keseluruhan hasil yang telah didapatkan yaitu “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan maksimal, sehingga pelaksanaan terhadap sasaran kendaraan mobil barang mengalami penurunan.
2. Pada Indikator Sumber Daya tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang berdasarkan keseluruhan hasil yang didapat yaitu “Cukup Terlaksana”, Hal ini dikarenakan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang melalui Seksi PKB sudah menjalankan pengujian kendaraan bermotor dengan cukup maksimal serta sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Pada indikator Komunikasi Antar Organisasi tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang berdasarkan keseluruhan hasil yang didapat yaitu “Cukup Terlaksana” hal ini dikarenakan komunikasi yang dilakukan antara pelaksana kebijakan/aturan dengan masyarakat tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Kota Tanjungpinang masih belum begitu maksimal.
4. Pada Indikator Karakteristik Agen Pelaksana tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang berdasarkan keseluruhan hasil yang didapat yaitu “Terlaksana. Hal ini dikarenakan karakteristik dan bekerja sesuai SOP yang dilakukan Pegawai Pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Kota Tanjungpinang sudah memenuhi syarat dan terlaksana dengan baik.
5. Pada Indikator Lingkungan, Ekonomi, Sosial dan Politik tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang berdasarkan keseluruhan hasil yang didapat yaitu “Kurang Terlaksana” Hal ini dikarenakan masih belum maksimalnya Pelaksanaannya Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Kota Tanjungpinang dikarenakan masih ada ditemukan kendaraan tidak layak jalan yang masih beroperasi dengan bebas.
6. Dan untuk indikator Disposisi Implementor dengan item penilaian kinerja pegawai terhadap tugas dan fungsinya, dan pemahaman terhadap kebijakan atau aturan PKB, dari hasil keseluruhan yang didapat ialah “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan Pegawai Pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang sudah melaksanakan tugas dan fungsi serta sudah memiliki kompetensi yang cukup dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

Berdasarkan jawaban yang telah dikumpulkan pada kesimpulan diatas, penulis dapat mengambil jawaban ini dari sisi pegawai dinas perhubungan bahwa Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Oeh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Studi Kendaraan Mobil Barang) yaitu “Cukup Terlaksana” Hal ini dikarenakan belum maksimalnya sasaran dalam pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan jumlah uji kendaraan , dan belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan mobil barang dalam memberikan pemahaman secara baik dan jelas serta mudah dimengerti.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang telah peneliti buat dari keseluruhan hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kedepannya adanya kerjasama yang baik antara supir atau pemilik kendaraan mobil barang dan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dengan adanya upaya dinas dalam memberikan pembinaan atau penyuluhan secara masif mengenai arti penting tentang pengujian kendaraan bermotor dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan mobil barang agar lebih peduli dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Kepada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang agar dapat memberikan sosialiasi dan himbauan yang lebih luas kepada masyarakat sebagai supir atau pemilik kendaraan mobil barang tentang wajibnya melaksanakan pengujian

kendaraan bermotor yaitu melalui berbagai media seperti media cetak maupun elektronik di Kota Tanjungpinang agar supir atau pemilik kendaraan mudah memahami dan mengetahui informasi dengan jelas tentang pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

3. Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang kedepannya agar dapat berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti polantas, dan TNI dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan atau yang dikenal dengan uji petik laik jalan atau inspeksi terhadap kendaraan mobil barang yang seharusnya dilakukan secara rutin minimal sebulan sekali dengan maksud untuk memberikan jaminan keselamatan dan mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan kendaraan tidak layak jalan, serta menindak tegas bagi kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Cardoso Faustino. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV.Andi Offset
- Fahtoni, Abdurrahman. 2016. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Hasibuan. Melayu. S. P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Karyoto. 2015. *Dasar-dasar Manajemen: Teori, definisi, dan konsep*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Martono Nanang, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Moenir, H.A.S, 2008. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nawawi, Hadari. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Pasolong Harbani, 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pradja, S. Juhaya. 2012. *Filsafat Manajemen*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Siagian, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi*, Jakarta : Bumi Aksara

Sjamsudin, Indradi. 2006. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*, Malang:

Agitek YPN

Sudaryono, 2018. *Metodelogi Penelitian*. Depok : Rajawali Pers

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen*. Pekanbaru :

UIR Press

JURNAL :

Permadhi, P.L.O. (2017). Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Mewujudkan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kota Denpasar. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(3), 272-288.

Syafitri, R., Rachmawati, I., & Meigawati, D. (2021). Implementasi Strategi Pengujian Kendaraan Bermotor. *JURNAL GOVERNANSI*, 7(1), 69-79.

Seran, G. G. (2020). Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala Angkutan Kota DI Kota Bogor. *ADMINISTRATIE Jurnal Administrasi Publik*, 2(2).

Utami, A. A., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang. *JURNAL GOVERNANSI*, 6(2), 104-113.

DOKUMENTASI :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau